

# Laporan Penelitian

## Kebutuhan Pengembangan Usaha Kakao dengan Pendekatan Rantai Nilai & Evaluasi Gerakan Nasional Peningkatan dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO)

Studi Kasus Kabupaten Sikka,  
Nusa Tenggara Timur



FORDFOUNDATION

# LAPORAN PENELITIAN

---

## Kebutuhan Pengembangan Usaha Kakao dengan Pendekatan Rantai Nilai

**KERJASAMA ANTARA:**

FORD FOUNDATION

dengan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

**Jakarta 2013**

## **Tim Peneliti KPPOD:**

Ig. Sigit Murwito  
Sri Mulyati

2013



*Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*

Gd. Permata Kuningan Lt.10  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C  
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980  
Telp: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643

# DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Studi.....	2
1.4 Manfaat Studi.....	2
II. KERANGKA PIKIR .....	2
III. METODOLOGI STUDI .....	3
3.1. Pendekatan Studi.....	4
3.2. Lokasi dan Waktu Studi .....	4
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	5
3.4. Metode Pengumpulan Data dan Responden.....	4
3.5. Metode Analisis .....	5
IV. POTENSI KENDALA DAN PELUANG PENGEMBANGAN KAKAO DI SIKKA .....	5
4.1 Latar Belakang Usaha Pertanian Kakao di Sikka.....	5
4.2 Masalah-Masalah yang dihadapi Petani.....	6
4.3 Identifikasi Faktor Internal Pengembangan Kakao di Kabupaten Sikka.....	7
4.4 Identifikasi Rantai Nilai Pengembangan Kakao di Sikka.....	9
4.5 Regulasi Terkait Usaha Tani dan Perdagangan dalam Rantai Nilai Kakao di Kab.Sikka.....	11
4.6 Identifikasi Faktor Eksternal Pengembangan Kakao di Sikka.....	12
4.7 Analisis Strategi Pengembangan.....	18
4.8 Stakeholders dan peranannya dalam Rantai Nilao Kakao di Sikka.....	21
V. PENUTUP.....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Areal Tanaman Kakao,Produksi,Produktifitas, dan Jumlah Kepala Keluarga yang terlibat dalam Budidaya Kakao di Sikka (Tahun 2012).....	8
Tabel 2.	Matriks Pemasalahan dan rencana Tindak Lanjut Pengembangan Rantai Nilai Kakao di Kabupaten Sikka.....	18
Tabel 3.	Matriks Analisis Stakeholders pengembangan Kakao di nKabupaten Sikka .....	23
Tabel 4.	Matriks stakeholder yang belum berperan secara Optimal.....	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sistem Agribisnis di Indonesia.....	8
Gambar 2.	Kerangka Pemikiran Studi.....	3
Gambar 3.	Rantai Nilai Usaha Kakao di Kabupaten Sikka.....	10
Gambar 4.	Stake holdersUsaha Kakao diKabupaten Sikka.....	21

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu pendekatan pembangunan pertanian adalah melalui kegiatan agribisnis yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan pengembangan usaha ekonomi rakyat yang berkelanjutan, yang dilakukan dalam kerangka otonomi daerah untuk memperkuat perekonomian daerah. Pengembangan sektor pertanian melibatkan berbagai aspek rantai nilai, baik pada tahap bercocok tanam, pengumpulan, perdagangan, maupun pengolahan. Dengan demikian, agar produk pertanian yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek rantai nilai dari usaha tersebut.

Salah satu produk pertanian yang cukup strategis adalah tanaman kakao. Kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan penting yang secara historis pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1560, namun baru menjadi komoditas penting sejak tahun 1951. Kemudian pemerintah mulai menaruh perhatian dan mendukung industri kakao pada tahun 1975, yaitu setelah PTP VI berhasil meningkatkan produksi tanaman ini melalui penggunaan bibit unggul Upper Amazon Interclonal Hybrid (Sunanto, 1992).

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan produsen kakao nomor tiga di dunia dengan produksi 809.583 ton setelah Pantai Gading yang produksinya 1.223.150 ton. Dengan produksi sebesar itu, komoditi ini telah menyumbangkan devisa sebesar US \$ 1.4 Milyar pada tahun 2009 yang merupakan perolehan devisa ketiga terbesar di sektor perkebunan setelah komoditas kelapa sawit dan karet. Selama tahun 1998 hingga 2011, luas areal perkebunan kakao tercatat mengalami peningkatan sebesar 9% per tahun. Dari 1.746 juta hektar luas areal perkebunan kakao, 94% dikelola oleh rakyat, selebihnya 3.1% dikelola pemerintah dan 2,9% oleh perkebunan besar swasta. (Ditjenbun, 2012)

Kakao strategis paling tidak karena dua alasan. Pertama karena komoditi ini merupakan komoditi

perdagangan internasional yang memiliki nilai yang tinggi, dan Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Kedua, kegiatan usaha ini 95% melibatkan petani kecil dengan tingkat kepemilikan lahan antara 0,5 ha–2 ha. Dengan demikian perkembangan usaha kakao ini secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap ekonomi kerakyatan.

Kendati tergolong sebagai komoditas unggulan, secara garis besar usaha tani kakao rakyat ini masih memiliki beberapa kekurangan dan perlu ditingkatkan. Kekurangan tersebut terkait dengan berbagai aspek, mulai dari budidaya pemeliharaan, panen/pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran. Namun dengan potensi yang dimiliki, usahatani ini berpeluang untuk dibiayai baik secara teknis maupun dalam hal penataan kelembagaannya.

Mengingat strategisnya komoditi kakao, maka banyak Pemerintah Daerah (Pemda) mencanangkan bisnis pertanian kakao sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Namun dari sekian banyak pemda yang mengarahkan kakao sebagai penggerak perekonomian daerah, tidak banyak yang memiliki program kongkrit dalam pengembangan pertanian kakao. Dapat dikatakan bahwa tidak ada intervensi khusus baik berupa program maupun regulasi guna mengaselerasi perkembangan usaha agribisnis kakao di daerah. Kegiatan usaha kakao dibiarkan tumbuh sendiri tanpa dukungan yang signifikan dari pemda.

Di tingkat pusat, ada Program Nasional Peningkatan Produksi dan Kualitas Kakao (GERNAS). Tujuan dari program GERNAS adalah meningkatkan produksi kakao, pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Program GERNAS juga dijadikan sebagai momentum untuk kebangkitan industri kakao Indonesia yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan mewujudkan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar di dunia. Pemerintah mengklaim bahwa Gernas berdampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas kakao, pendapatan petani,

---

pertumbuhan ekonomi, dan juga pemberdayaan petani. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi lebih lanjut dari pelaksanaan program GERNAS tersebut.

KPPOD sebagai lembaga yang concern terhadap upaya-upaya perbaikan perekonomian daerah, bermaksud untuk berkontribusi dalam perbaikan kualitas kebijakan daerah terkait dengan pengembangan usaha kakao, serta memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program GERNAS. Dengan bantuan FORD Foundation, KPPOD merancang program "Pengembangan Iklim Usaha bagi Peningkatan Rantai Nilai Produksi Kakao". Melalui program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penciptaan lingkungan investasi yang kondusif bagi aktivitas usaha kakao. Program ini juga dimaksudkan untuk evaluasi dan masukan atas pelaksanaan program GERNAS. Mengingat luasnya lingkup rantai nilai kakao tersebut, program ini lebih dikhususkan untuk menyoroti faktor kelembagaan dalam budidaya kakao.

Tahapan awal pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan penelitian, terkait dengan pengembangan usaha kakao di daerah. Kegiatan penelitian dirancang sebagai dasar untuk pelaksanaan tiga kegiatan lainnya (deseminasi, advokasi, dan asistensi teknis terhadap pemerintah daerah), serta menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang merupakan prioritas pemerintah provinsi dan kabupaten. Penelitian mengambil sampel dua daerah yang akan didampingi, yakni Kabupaten Sikka di NTT dan Kabupaten Majene di Sulawesi Barat.

### 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan pengembangan iklim usaha bagi peningkatan rantai nilai produksi kakao, dan mendapatkan gambaran hasil pelaksanaan program GERNAS Kakao. Secara spesifik, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran umum usaha kakao di daerah studi?
- 2) Bagaimana permasalahan setiap rantai nilai usaha kakao di daerah studi?
- 3) Bagaimana rencana tindak lanjut pengembangan iklim usaha bagi peningkatan rantai nilai usaha kakao di daerah studi?

### 1.3 Tujuan Studi

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan gambaran umum kakao di Kabupaten Sikka;
- 2) Menganalisis permasalahan yang terjadi pada setiap rantai nilai usaha kakao di Kabupaten Sikka;
- 3) Menganalisis rencana tindak lanjut untuk setiap permasalahan di tiap mata rantai nilai dan pengembangan iklim usaha bagi peningkatan rantai nilai usaha kakao di Sikka ke depan.

### 1.4 Manfaat Studi

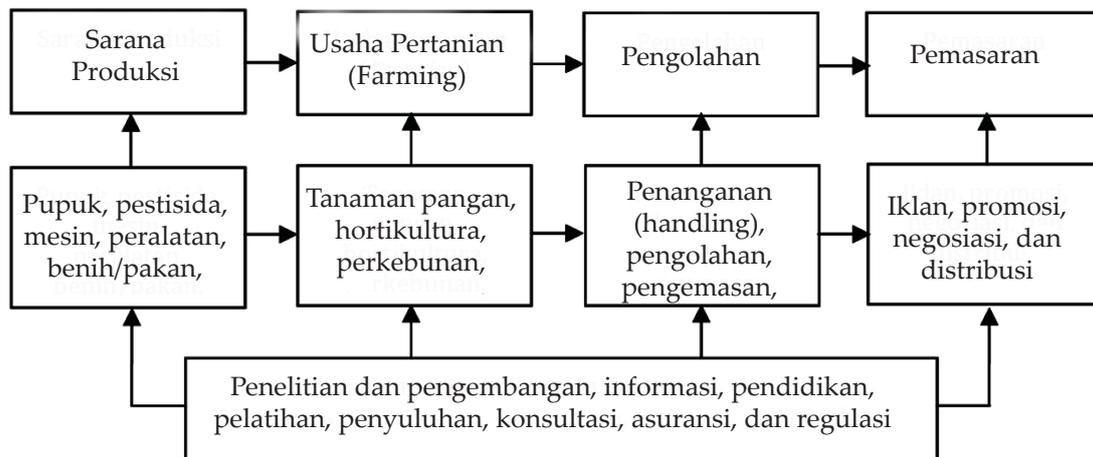
Hasil studi ini diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai permasalahan dan analisis stakeholder di setiap rantai nilai kakao di Sikka. Harapannya, hasil studi ini menjadi masukan kebijakan yang memadai untuk mengatasi permasalahan kakao untuk meningkatkan produktivitas kakao di Sikka. Selain itu, studi ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi titik-titik penting bagi penguatan kapasitas pelaksanaan di lapangan dalam kerangka pengembangan iklim usaha bagi peningkatan rantai nilai usaha secara operasional.

## BAB II. KERANGKA PIKIR

Secara umum sistem agribisnis mencakup subsistem mulai dari pemasok sarana produksi, usaha pertanian (farming), pengolahan, hingga pemasaran (Baga, 2003). Untuk menunjang eksistensi subsistem agribisnis, diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan, informasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, konsultasi, asuransi, dan regulasi (Gambar 1).

Sebagai sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat Sikka, berkebun kakao diharapkan menjadi penopang kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Namun kenyataannya, usaha kakao belum memberikan keuntungan bagi para petaninya. Hal ini dikarenakan petani tidak memiliki kekuatan terutama dalam pemasaran. Dalam pemasaran kakao, posisi tawar (bargaining position) petani rendah sehingga keuntungan

Gambar 1. Sistem Agribisnis di Indonesia (Baga, 2003)



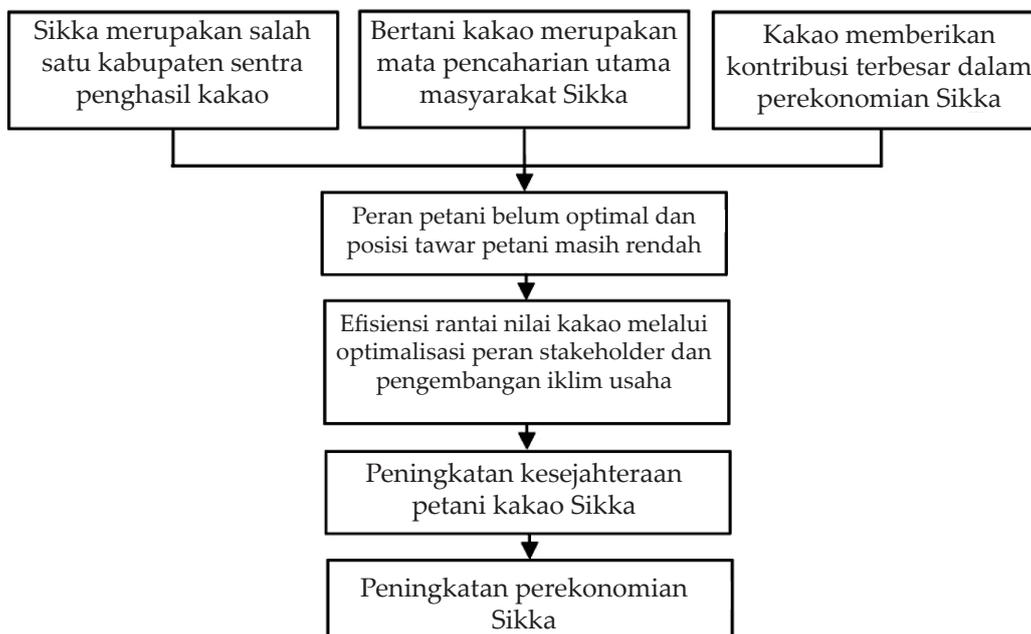
dari hasil berkebun kakao pun kurang maksimal. Rendahnya posisi tawar ini diakibatkan beberapa hal, seperti adanya gangguan dari pedagang pengepul yang membeli langsung kepada petani, produktivitas petani masih rendah, dan panjangnya rantai perdagangan kakao.

Untuk mengoptimalisasi peran petani kakao dan meningkatkan posisi tawar petani kakao, diperlukan analisis rantai nilai usaha kakao di Sikka. Rantai nilai merupakan aktifitas yang berawal dari bahan mentah sampai dengan penanganan purna jual. Rantai nilai ini mencakup aktivitas yang terjadi karena hubungan dengan pemasok (Supplier Linkages) dan hubungan dengan konsumen (Customer Linkages). Analisis

rantai nilai ini perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki dan mengefisienkan setiap rantai nilai usaha kakao di daerah tersebut sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian Sikka.

Untuk mendukung analisis rantai nilai tersebut, diperlukan juga analisis stakeholder yang menggambarkan peran masing-masing stakeholder di dalam setiap rantai nilai. Dengan analisis stakeholder tersebut, akan terlihat peran stakeholder yang masih perlu ditingkatkan di dalam setiap rantai nilai kakao. Dari analisis ini diharapkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja para stakeholder dalam setiap rantai nilai usaha kakao di Sikka.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Studi



Kebijakan pengembangan agribisnis kakao dapat dilihat dari beberapa aspek yang berhubungan dengan: (1) potensi, kendala, dan peluang pengembangan; (2) analisis strategi pengembangan; dan (3) langkah operasional kebijakan pengembangan. Potensi, kendala, dan peluang pengembangan diidentifikasi dan dianalisis menggunakan analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threat). Analisis SWOT diawali dengan mengidentifikasi Kab. Sikka dari sisi aspek kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) untuk faktor internal, serta peluang (opportunity) dan ancaman (threat) untuk faktor eksternal (Sianipar dan Entang, 2001 dalam Manikmas, 2003).

Selanjutnya, analisis strategi pengembangan didekati melalui matrik pemahaman aspek pokok masalah, sumber masalah, akar masalah, intervensi/rencana tindak lanjut, dan stakeholder yang berperan. Sementara itu, langkah operasional kebijakan pengembangan dilakukan dalam kerangka analisis kelembagaan dalam pengembangan usaha pertanian kakao.

## **BAB III. METODOLOGI STUDI**

### **3.1 Pendekatan studi**

Studi ini memakai pendekatan kualitatif yang menempatkan masalah pengembangan iklim usaha dan peningkatan rantai nilai sebagai hasil interaksi stakeholders pada setiap titik rantai nilai, baik yang terlibat dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan. Dengan pendekatan demikian diharapkan secara induktif akan terbentuk interpretasi dan pemahaman makna rantai nilai kakao dan masalah pengembangan iklim usaha maupun interaksi antar stakeholder yang terlibat. Untuk maksud itu, penelitian ini bertipikal deskriptif: menggambarkan dan menjelaskan secara analitik mengapa dan bagaimana pola-pola masalah terjadi.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Studi**

Studi ini dilaksanakan selama tiga bulan dari 20 November 2012 hingga 2 Februari 2013 di Kabupaten Sikka.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari hasil wawancara dan focus group discussion (FGD) dengan stakeholders kakao di Kabupaten Sikka. Selain di Sikka juga dilakukan wawancara dan FGD dengan stakeholders kakao di tingkat nasional. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka, Badan Pusat Statistik Sikka, Kementerian Pertanian serta dari lembaga/instansi lainnya.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden**

Pengumpulan data primer dalam studi ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

- 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap latar dan objek penelitian.
- 2) Wawancara mendalam (In-depth interview), yaitu teknik dalam penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam kepada narasumber terpilih atau para stakeholder usaha kakao di Sikka dan di tingkat nasional.
- 3) Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholders kakao di Kabupaten Sikka, maupun stakeholders kakao di tingkat Nasional.

Pemilihan narasumber dalam studi ini pada dasarnya berdasar purposeful sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan jenis informasi atau pertimbangan yang sudah ada/ditetapkan sebelumnya dan adanya identifikasi atas kelompok/orang yang memiliki kekhususan tertentu (terkait jabatan, kepakaran/expert sampling, dan pengalaman dalam usaha kakao). Namun di lapangan, sebagai bagian dari purposeful sampling adalah dimungkinkan dan bahkan didorong untuk pengembangan kategori/subjek narasumber lain berdasarkan teknik snowballing (berdasarkan keterkaitan informasi, rekomendasi nama, dst.

Bertolak dari teknik tersebut, narasumber yang diwawancarai merupakan stakeholders kakao yang terkait langsung dengan rantai nilai kakao di

Kabupaten Sikka yakni petani, pengepul tingkat desa/kecamatan, pengepul besar, penyedia sarana produksi, penyuluh serta Dinas Peertanian, Kehutanan dan Perkebunan Sikka, Bappeda, dll.

### **3.5 Metode Analisis**

Dalam menjawab rumusan permasalahan, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan metode analisis rantai nilai. Porter (2001), mendefinisikan Analisis Rantai Nilai (Value Chain Analysis) sebagai alat untuk memahami rantai nilai yang membentuk suatu produk. Rantai nilai ini berasal dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan, mulai dari bahan baku dari pemasok hingga produk akhir sampai ke tangan konsumen, termasuk juga pelayanan purna jual. Tujuan dari analisis rantai nilai adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap rantai nilai dimana pelaku rantai nilai dapat meningkatkan nilai produk untuk konsumen atau menurunkan biaya dan mengefisienkan kerja. Penurunan biaya atau peningkatan nilai tambah (value added) dapat membuat suatu usaha atau industri lebih kompetitif.

Dalam analisa rantai nilai, terdapat dua aktivitas bisnis, yakni aktivitas utama (primary activities) dan aktivitas pendukung (support activities). Aktivitas utama adalah semua aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan penambahan nilai terhadap masukan-masukan dan mentransformasikannya menjadi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Aktivitas ini meliputi: inbound logistics, operasi, outbound logistics, pelayanan, pemasaran dan penjualan. Aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang mendukung atau memungkinkan semua aktivitas utama berfungsi dengan efektif. Aktivitas pendukung ini meliputi: infrastruktur, sumberdaya manusia, dan iptek.

## **BAB IV. POTENSI, KENDALA, DAN PELUANG PENGEMBANGAN KAKAO DI SIKKA**

### **4.1 Latar Belakang Usaha Pertanian Kakao di Sikka**

Pada intinya, pelaksanaan kegiatan usaha pertanian kakao mencakup dua aspek, yakni aspek teknis

dan kelembagaan. Pada aspek teknis mencakup: (1) bidang komoditas yang meliputi aspek produksi, sarana produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil; (2) bidang pemanfaatan sumberdaya lahan dan air; (3) bidang pemanfaatan limbah dan air; dan (4) bidang konservasi tanah dan air (Badan Litbang Pertanian, 2004b). Sementara dari aspek kelembagaan, diharapkan akan meningkatkan kinerja kelembagaan agribisnis yang selanjutnya berdampak pada peningkatan aksesibilitas petani terhadap pasar input dan output, permodalan dan teknologi unggul. Peningkatan kinerja kedua aspek teknis dan kelembagaan agribisnis tersebut berikutnya diharapkan berdampak positif pada kinerja hasil usaha tani yang dicapai, khususnya petani dan umumnya bagi kehidupan masyarakat desa berupa peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan.

Pola usaha tani di Kabupaten Sikka relatif mirip dengan wilayah lain di wilayah Provinsi NTT terutama di wilayah Pulau Flores, yakni melaksanakan usaha tani lahan kering sistem terpadu. Komoditas yang diusahakan adalah tanaman pangan, perkebunan dan ternak. Implementasi komoditas tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan fisik wilayah.

Lahan yang dapat dikembangkan untuk budidaya pertanian di Sikka seluas 101.858 atau 58,81% dari total luas lahan yang ada. Dari luasan tersebut dimanfaatkan untuk tanaman pangan seluas 27.785 ha (16,04%) yang terdiri atas lahan basah seluas 1.749 ha dan lahan kering 26.036 ha. Tanaman hortikultura dan tahunan dapat dikembangkan pada lahan yang ada dan dapat dikombinasikan dengan tanaman pangan.

Sebagian besar sistem usaha tani di Sikka berbasis tanaman perkebunan seperti kakao, jambu mete, kelapa ataupun kopi dan cengkeh. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem usaha tani di Timor dan Sumba yang berbasis tanaman pangan seperti padi, jagung dan kacang-kacangan yang berperan sebagai food security. Di Sikka khususnya wilayah-wilayah pusat tanaman kakao, tanaman pangan perannya sangat kecil, bahkan pada banyak wilayah petani tidak menanam tanaman pangan. Petani Sikka, sangat mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari kakao yang hasil penjualannya mereka

---

gunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras atau bahan pangan lain.

Coklat (*Theobroma cacao*, L) yang artinya “Santapan Dewata” atau di Flores lebih dikenal dengan nama kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan rakyat. Tanaman ini berbuah sepanjang tahun, oleh karenanya tanaman ini menjadi sumber pendapatan harian atau mingguan petani. Tanaman kakao sendiri telah datang ke Pulau Flores sejak setahun setelah Indonesia merdeka, dan mulai dikenal luas oleh masyarakat Sikka sejak tahun 1960-an. Mula-mula tanaman kakao dibawa oleh para misi secara perseorangan. Pada waktu itu pohon kakao ditanam di sekitar gereja dan kantor-kantor misi, kemudian berkembang ke kebun petani. Baru pada awal tahun 80-an, pemerintah secara intensif mempromosikan tanaman kakao.

Awal dekade 1970 pusat produksi kakao praktis hanya di Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Bola. Perkembangan selanjutnya tanaman ini dikembangkan hampir di semua wilayah kecamatan di kabupaten Sikka pada daerah ketinggian 500 – 1000 m dari permukaan laut. Saat ini sebanyak 17 kecamatan dari 21 kecamatan (kecuali Kec. Alok, Alok Barat, dan Magepanda) menghasilkan kakao, dan sudah menjadi tanaman perkebunan utama. Tanaman Kakao penting bagi Kabupaten Sikka karena merupakan komoditi penyumbang pendapatan utama bagi petani. Setidaknya 32.738 keluarga petani bergantung hidupnya pada budidaya tanaman ini.

#### 4.2 Masalah-masalah yang Dihadapi Petani

Wabah hama penyakit pada tanaman kakao di Sikka dari tahun 2006 hingga sekarang, menyebabkan perubahan situasi yang signifikan terhadap kehidupan petani kakao di Sikka. Ledakan hama penyakit akibat organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman kakao menyebabkan produktivitas rendah dan menghancurkan sumber pendapatan keluarga mereka. Selain serangan hama penyakit faktor umur tanaman yang sudah tua – sebagian sudah lebih dari 30-45 tahun - juga menjadi masalah yang cukup penting bagi petani kakao di Sikka. Usia tanaman yang tua ini juga ditengarai menyebabkan tanaman rentan terhadap hama penyakit disamping produktivitasnya juga semakin menurun.

Kasus ini telah berlangsung sejak tahun 2006, dan pada tahun 2008 dianggap puncak ledakan yang terasa pada penurunan pendapatan petani, (BPTP NTT). Lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian propinsi NTT di Maumere mengatakan bahwa jenis hama/penyakit yang sering menyerang tanaman kakao di NTT antara lain: hama penggerek buah kakao (*Conopomorpha cramerella*), kepik penghisap buah kakao (*Helopeltis* spp), dan penyakit busuk buah (*Phytophthora palmivora*). Kondisi serangan hama dan penyakit ini sudah bersifat kompleks. Hama dan penyakit ini merupakan masalah paling populer bagi petani kakao di mana saja termasuk di Sikka. Hal ini berarti, secara teknis dapat ditanggulangi dengan metode dan pendekatan sesuai kondisi spesifik wilayah.

Usia tanaman kakao dan pola tanan tumpang sari yang kurang memperhatikan sanitasi lingkungan yang diterapkan di Sikka juga dinilai para ahli sebagai penyebab mudahnya terjadi serangan hama penyakit. Tanaman kakao hanya bisa hidup pada suhu stabil antara 30°C–32°C dan pada tingkat kelembaban udara sekitar 1100 ml/tahun. Ketika suhu udara tidak stabil, curah hujan tidak teratur yang tentunya berpengaruh pada kelembaban udara. Penyinaran yang tidak mencukupi akan mempengaruhi proses fisiologi pada tanaman kakao. Curah hujan yang tinggi antara 3–6 hari saja akan menyebabkan kelembaban udara yang tinggi dan memungkinkan tumbuhnya cendawan *Phytophthora palmivora* yang menyebabkan penyakit busuk buah. Tanda buah kakao yang terserang, ada bercak coklat kehitaman yang biasanya dimulai dari ujung atau pangkal buah.

Walaupun penyebab hilangnya pendapatan dari kakao yang disebabkan oleh hama dan penyakit, namun esensi dari permasalahan utama adalah karena umur tanaman yang sudah tua dan mengalami kompleksitas dengan serangan hama dan penyakit yang serius. Masalah ini ditemui secara meluas hampir pada semua kecamatan-kecamatan penghasil kakao di Sikka.

Bila hama dan penyakit ini dibiarkan maka dapat mengakibatkan 80–100% pendapatan petani yang berasal dari kakao akan hilang. Produksi kakao di Sikka sampai dengan tahun 2003 mencapai 14.333,2 ton dengan nilai nominal Rp.372.663.200.000,-. Mulai

tahun 2004 produksi kakao terus menurun hingga 54% atau 7.739,93 ton atau setara kehilangan PDRB Rp.201,2 Milyar per tahun. Kehilangan PDRB sebesar itu mengakibatkan penurunan aktivitas multiplier effect roda perekonomian di Sikka. Penurunan konsumsi barang dan jasa, produksi menurun, serapan tenaga kerja dan bahan baku menurun, distribusi pendapatan masyarakat dan akhirnya masyarakat terpuruk.

Saat ini seorang petani kakao dengan luas lahan 1 ha hanya dapat memanen 497 kg per tahun. Dengan asumsi harga kakao Rp.17.000,- / kg, itu berarti penghasilan petani hanya Rp.8.449.000,- per tahun atau Rp.704.083,- per bulan, sebelum dikurangi dengan biaya produksi. Penghasilan sebesar itu sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, dan berarti kebutuhan lainnya tak dapat dipenuhi.

#### **4.3 Identifikasi Faktor Internal Pengembangan Kakao di Kabupaten Sikka**

Identifikasi faktor internal mencakup: (1) ketersediaan tenaga kerja keluarga; (2) penguasaan lahan usaha; (3) penguasaan modal usaha; (4) produksi; (5) pemasaran; (6) kelembagaan sosial; dan (7) kelembagaan ekonomi. Dari hasil identifikasi diperoleh gambaran sebagai berikut:

##### **Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia**

Jumlah Petani Kakao di Sikka sebanyak 33.278 KK (Dinas Pertanian: 2011) Usaha tani kakao dapat dikatakan sebagai sumber mata pencaharian utama penduduk di Sikka. Oleh karena itu, curahan waktu kerja dan alokasi tenaga kerja anggota rumah tangga petani setempat lebih banyak untuk kegiatan pekerjaan usaha tani ini. Sebagai gambaran, rataan proporsi penggunaan tenaga kerja dalam keluarga adalah sekitar 60,23% dari total tenaga kerja yang diperlukan untuk pengelolaan usaha tani kakao. Usia petani rata-rata 45 tahun ke atas. Saat ini pengembangan usaha kakao di Sikka di hadapkan pada kenyataan bahwa generasi muda mulai jarang yang berminat untuk bekerja di sektor pertanian.

##### **Produksi**

Perkebunan kakao tersebar di 17 kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Sikka dengan total luas lahan 21.657 Ha dan total produksi sebesar 6.409 ton (Disbuntan Kabupaten Sikka, 2011). Usaha perkebunan Kakao di Sikka dalam skala usaha pertanian tradisional, dengan produktivitas rata-rata 497 kg/ha/tahun (jauh dibawah rata-rata nasional (900kg/ha/tahun). Sementara itu kualitas produksi masih tergolong rendah, karena belum ditangani secara maksimal khususnya pada pasca panen.

Kakao di Kabupaten Sikka merupakan salah satu jenis kakao dengan kualitas terbaik. Potensi kakao di Kabupaten Sikka sebelumnya sangat menjanjikan dan setiap tahun mampu memproduksi sekitar 7.880 ton. Tetapi saat ini 90% luas perkebunan kakao nyaris rusak dan tidak lagi memproduksi dengan baik, hingga pada tahun 2011, produksi kakao di Sikka hanya mencapai 6.409 ton, hal ini dapat dilihat ditabel 1.

##### **Penguasaan Lahan**

Lahan untuk budidaya kakao dimiliki oleh Petani secara pribadi (keluarga), tidak satupun yang menyewa kepada pihak lain, dengan rata-rata tingkat kepemilikan lahan kurang dari 0,5 Ha. Hanya 7% Petani yang memiliki lahan lebih dari 1, dan hanya 10% petani yang memiliki lahan 1 ha atau lebih. Peningkatan luas kebun kakao dengan skala usaha Perkebunan swasta sudah tidak memungkinkan lagi, kecuali mengganti jenis tanaman yang sudah ada dengan kakao. Dalam hal ini tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk mempertahankan luas usaha kakao, atau menyediakan lahan untuk pengembangan usaha kakao di Sikka.

Dengan rataan luas tersebut, maka cukup beralasan bagi rumah tangga petani setempat untuk menjadikan usahatani kakao sebagai sumber utama mata pencaharian keluarga. Akan tetapi ekstensifikasi dalam bentuk ekspansi penguasaan lahan, terutama keluar desa baik yang dibeli maupun yang disewa atau menerima gadai, tidak terjadi di Sikka.

**Tabel 1. Luas Areal Tanaman Kako, Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Kepala Keluarga yang Terlibat dalam Budidaya Kakao di Sikka (Tahun 2012)**

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)				Produksi (TON)	Produktivitas (kg/Ha)	Jumlah KK
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	ALOK	5	7	165	177	2	286	272
2	NITA	822	1.358	298	2.478	730	538	3.812
3	MEGO	462	754	138	1.354	259	344	2.083
4	PAGA	310	504	68	882	173	343	1.357
5	KEWAPANTE	230	487	132	849	323	663	1.306
6	WAIGETE	355	616	118	1.089	248	403	1.675
7	BOLA	475	967	209	1.651	412	426	2.540
8	TALIBURA	457	758	48	1.263	562	741	1.943
9	PALUE	146	250	26	422	230	920	649
10	LELA	402	722	92	1.216	474	657	1.871
11	NELLE	175	705	56	936	350	274	1.440
12	ALOK TIMUR	-	-	-	-	-	-	-
13	ALOK BARAT	11	15	386	412	5	333	594
14	MEGEPANDA	205	339	75	619	91	268	952
15	TANAWAWO	383	614	35	1.032	183	298	1.588
16	HEWOKLOANG	793	1.442	429	2.664	875	607	4.098
17	KENGAE	218	366	99	683	325	888	1.051
18	DORENG	638	909	102	1.649	400	440	2.537
19	MAPITARA	273	542	115	930	312	576	1.431
20	WAIBLAMA	206	330	-	536	230	697	285
21	KOTING	387	302	126	815	225	745	1.254
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.953</b>	<b>11.987</b>	<b>2.717</b>	<b>21.657</b>	<b>6.409</b>	<b>10.497</b>	<b>29.156</b>

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan  
 TM = Tanaman Menghasilkan  
 TTM / TR = Tanaman Tidak Menghasilkan/Tanaman Rusak

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2012

Kepadatan agraris dan kepadatan penduduk, mendesak ketersediaan lahan untuk budidaya kakao. Persoalan lain terkait dengan penguasaan lahan adalah adanya konflik lahan yang disebabkan oleh kembalinya para transmigran yang merasa masih memiliki kepemilikan lahan pada tanah yang ditinggalkannya semula. Sementara tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk mempertahankan luas usaha kakao, atau menyediakan lahan untuk pengembangan usaha kakao di Sikka.

### Penguasaan Modal

Selama ini para petani di Sikka terbukti mampu membiayai usahatani kakao mereka secara swadana, kendati kategori pembiayaannya kebanyakan bersifat asal secukupnya menurut kemampuan masing-masing petani. Dengan kata lain petani setempat

mengalami keterbatasan dalam modal usahatani, sehingga upaya penerapan teknologi juga terbatas.

### Lingkungan Sosial Budaya

Di lingkungan masyarakat Sikka ada satu tradisi dalam hal gotongrayong usah atani yang disebut "Sakoseng" dan "Ula babag". Tradisi ini sebetulnya merupakan salah satu kekuatan untuk saling membantu dan meringankan pekerjaan sesama petani. Akan tetapi fenomena akhir-akhir ini mengalami degradasi dan mulai berkurang.

Dalam melakukan usaha tadi masih dilakukan secara tradisional dan tidak memiliki rencana hidup sepanjang tahun. Ikatan dengan tanah masih ada, dan mayoritas masih mau bertani. Namun saat ini pengembangan usaha kakao di Sikka di hadapkan pada kenyataan bahwa generasi muda mulai jarang

yang berminat untuk bekerja di sektor pertanian. Usia petani rata-rata 45 tahun ke atas.

Dalam masyarakat terjadi pergeseran konsep pengembangan ekonomi dari ekonomi kapitalis ke ekonomi kerakyatan yang ditandai oleh adanya usaha perkoperasian, credit union, usaha bersama simpan-pinjam, arisan, Kelompok tani, dan lain yang lahir dari suatu kesadaran baru tentang pentingnya usaha swadaya dari bawah.

#### **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana produksi dengan kapasitas terbatas tersedia di Sikka. Akan tetapi, sarana dan prasarana produksi yang lengkap berada di luar desa, yakni di ibu kota kabupaten (Maumere). Kelompok tani yang salah satu perannya diharapkan dapat membantu penyediaan keperluan petani, justru tidak berfungsi. Hal demikian disebabkan oleh tidak aktifnya organisasi ini di lokasi setempat.

Suplay input yang bersifat komersial hanya dikuasai oleh dua toko. Program pengembangan input supply kebanyakan dari NGO, Pemprov, dan Pusat, sementara dari Pemkab sendiri tidak memiliki inisiatif dalam pengembangan kakao. Suplay input untuk petani tergantung dari program pemerintah dan NGO untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi.

Terkain dengan infrastruktur pendukung, kondisi sarana dan prasarana (khususnya transportasi) di Kab. Sikka relatif memadai. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebagian kondisi jalan tersebut ada yang kurang baik.

#### **4.4. Identifikasi Rantai Nilai Pengembangan Kakao di Sikka**

Terdapat beberapa mata rantai nilai dalam pengembangan usaha kakao di Sikka. Rantai nilai pertama adalah rantai nilai penyedia input atau sarana produksi (saprodi), kemudian rantai produksi/nilai budidaya pertanian, rantai nilai pengolahan, dan yang paling akhir adalah rantai nilai perdagangan. Namun, karena keterbatasan studi ini, rantai nilai kakao yang akan dibahas mulai dari mencakup pemasok hingga pemasaran yang ada di

tingkat kabupaten saja. Untuk rantai nilai konsumen akhir biji kakao maupun produk cokelat sebagai turunannya belum dibahas dalam studi ini. Secara ringkas, rantai nilai usaha kakao dan stakeholder di masing-masing rantai nilai di Kabupaten Majene dapat digambarkan oleh gambar 3.

#### **Sarana Produksi/Faktor Input**

Terdapat tiga sumber untuk faktor input, yakni 1) yang bersifat komersial, 2) Subsidi (Pemerintah, LSM, Gereja), 3) Swadaya petani sendiri. Untuk input / sarana produksi yang komersial, hanya disediakan oleh dua toko yakni "Dirgahayu" dan "Putra Remaja", dimana supply saprodi kebanyakan diambil dari Jawa.. Selebihnya adalah dari bantuan pemerintah atau LSM melalui berbagai program, yang salah satunya adalah program Gernas. Namun demikian suplay yang berasal dari subsidi ini keberlanjutannya kurang terjamin. Salah satu mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, misalnya, dilakukan dengan Petani mendapatkan pupuk dengan harga subsidi di Toko Dirgahayu dengan melampirkan surat rekomendasi dari Disbuntan. Pada umumnya petani merasakan bahwa pupuk masih mahal. Pupuk umumnya dipakai untuk tanaman pangan, yang mencerminkan kesadaran petani untuk menggunakan pupuk kurang.

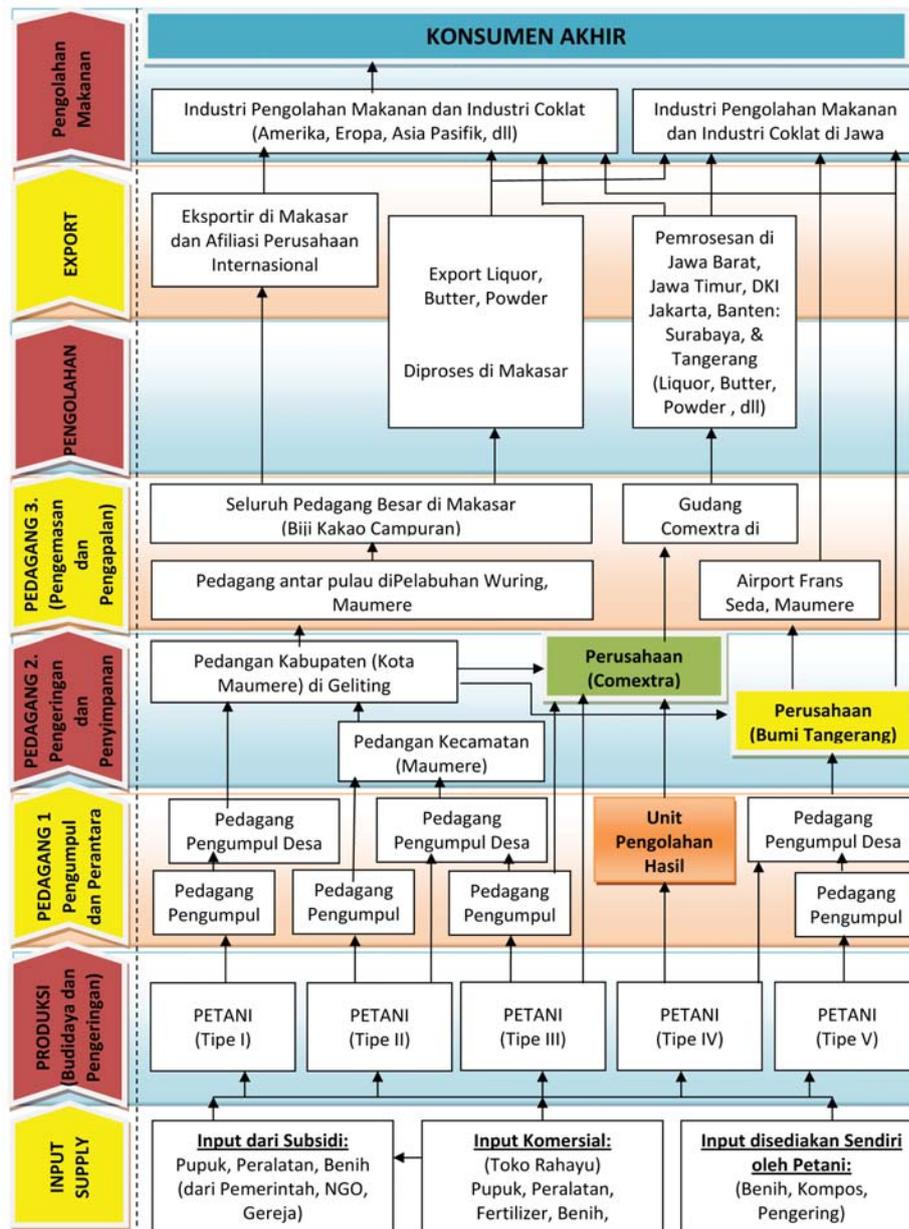
#### **Rantai Nilai Budidaya**

Posisi sentral adalah kegiatan-kegiatan on farm adalah petani sebagai aktor utama. Kegiatan on farm antara lain perawatan kebun seperti penyemprotan pestisida, pemangkasan, pemupukan sampai pada pemanenan kakao. Stakeholder lain di dalam rantai budidaya ini adalah Pemda, tenaga pendamping, dan juga kelompok tani. Produksi kakao di Sikka telah dilakukan turun-temurun secara mandiri. Selain petani secara individual, sudah mulai terlembaga adanya kelompok tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani) dalam proses produksi pertanian di Sikka.

#### **Unit Pengolahan Hasil**

UPH merupakan salah satu paket kegiatan di dalam program Gernas Kakao. Dalam paket tersebut, kabupaten yang menjadi pelaksana program Gernas

Gambar 3. Rantai Nilai Usaha Kakao di Kabupaten Sikka



mendapat bantuan UPH sebesar satu unit setiap tahunnya. Sementara pemilihan kelompok tani yang mengelola UPH berdasarkan kapasitas poktan dan lokasi poktan yang strategis. Pembangunan UPH diharapkan menjadi cikal bakal koperasi/asosiasi kakao. Ketiga UPH tersebut diharapkan dapat menampung semua produksi kakao dari petani. Namun, upaya tersebut tidak mudah. Inisiasi lembaga seperti UPH sudah seharusnya di dampingi sampai dapat mandiri.

Walaupun sudah terdapat UPH, para petani di kecamatan tersebut masih menjual biji kakaonya secara individu, tidak melalui UPH. Ada beberapa alasan petani tidak menjual biji kakaonya ke UPH,

diantaranya sistem kredit financial maupun sarana produksi yang dilakukan petani dengan pedagang (pengepul) mengharuskan petani menjual hasil panennya kepada pedagang tersebut. Selain itu letak UPH yang terkadang jauh sehingga petani lebih memilih menjual kepada pengepul yang datang ke rumah-rumah.

### Distribusi dan Pemasaran

Saat ini di Sikka terdapat kurang lebih 30 pedagang lokal. Dari 30 pedagang tersebut yang masuk kategori besar ada 5 dan 5 masuk kategori pedagang sedang yang semuanya berada di Kabupaten dan sebagian di kecamatan. Sementara 20 pedagang kecil tersebar

di desa-desa yang merupakan pedagang keliling. Pemasaran yang efektif sangat dibutuhkan dalam memasarkan biji kakao. Perbaikan dalam bidang pemasaran yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemasaran diupayakan dengan memperbesar nilai yang diterima petani, memperkecil biaya pemasaran dan terciptanya harga jual yang layak bagi petani kakao.

Berikut ini adalah tiga saluran utama pemasaran kakao di kabupaten Majene:

- 1) Petani -> Pedagang pengumpul desa -> pedagang pengumpul kecamatan -> pedagang besar -> pabrik
- 2) Petani -> pedagang pengumpul kecamatan -> pedagang pengumpul besar/perusahaan -> pabrik
- 3) Petani -> UPH -> pedagang pengumpul kecamatan -> pabrik

#### **4.5 Regulasi Terkait Usaha Tani dan Perdagangan dalam Rantai Nilai Kakao di Kab. Sikka**

Terkait dengan kegiatan usaha di Kabupaten Sikka, terdapat beberapa regulasi yang harus ditaati.

##### a. Untuk Memulai Usaha/Menanamkan Modal:

Sebagaimana diatur dalam Perda No 6 tahun 2011 tentang struktur kerja dan orang KPPT dan Penanaman Modal, untuk memulai usaha perdagangan maupun industri pengolahan, pengusaha harus memiliki izin usaha. Beberapa izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha di Sikka dalam rangka penanaman modal, yakni:

1. Izin Penunjang terdiri atas: SIUP untuk barang, terdaftar dan memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Izin Industri;
2. Izin Pelaksana terdiri atas: Izin lokasi, IMB, SITU dan HO (Izin Gangguan).

##### b. Untuk Kegiatan Perdagangan (Ekport/Import):

Selanjutnya dalam menjalankan operasional perusahaan (perdagangan), terdapat regulasi nasional yang implementasinya di daerah, yakni UU No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, PP No. 16 tahun 2002 tentang Karantina

Tumbuhan, dan PP No.82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, pengguna jasa wajib melaporkan tentang rencana pemasukan dan pengeluaran barang pada petugas karantina. Pada intinya peraturan-peraturan tersebut mensyaratkan beberapa hal, seperti:

1. Sertifikat Domestik Masuk:  
Biaya untuk mendapatkan sertifikat domestik masuk tergantung besarnya muatan. Sementara waktu untuk memperolehnya adalah 3 hari sebelum pengiriman.
2. Sertifikat Domestik Keluar:  
Besarnya biaya pembuatan tergantung besarnya muatan, sementara waktu untuk mengurusnya 3 hari sebelum pengiriman.
3. Sertifikat Ekspor:  
Besarnya biaya pembuatan tergantung besarnya muatan, dan waktu yang diperlukan untuk mengurus adalah 3 hari kerja.

Pada saat dilakukan pemasukan atau pengeluaran barang akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen maupun kelengkapan isi muatan oleh petugas karantina. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi bagi berupa penahanan maupun pemusnahan barang yang diperdagangkan. Selain itu menurut UU No. 16 Tahun 1992, sanksi juga dapat berupa denda sampai 50 juta dan hukuman kurungan 3 tahun.

##### c. Untuk Kegiatan Distribusi Barang:

Terkait dengan distribusi barang, terdapat beberapa ketentuan yang harus diikuti, yakni: Undang-undang No.16 tahun 1992 tentang Karantina Ikan dan tumbuhan, dan Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, serta PERMEN No.26 tahun 2008, tentang Kewenangan Penitipan Format dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Penelitian. Dalam ketentuan tersebut diatur kewajiban pelaku usaha untuk memiliki beberapa dokumen pendukung untuk kegiatan distribusi barang, yakni:

1. Dokumen Export:  
Besarnya biaya pembuatan dokumen export tergantung dari volume barang yang didistribusikan. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dokumen tersebut adalah tiga hari sebelum pengiriman.

2. Sertifikat Domestik Luar (antar pulau):  
Besarnya biaya pembuatannya tergantung volume barang yang akan dikirim, sedangkan waktu untuk mengurus sertifikat adalah 2 - 3 hari.
3. Dokumen Domestik Masuk:  
Besarnya biaya pembuatannya tergantung volume barang, sedangkan waktu untuk memperoleh dokumen tergantung dari pemeriksaannya.

Cara untuk mendapatkan document-dokumen tersebut diatas adalah pengguna jasa mengajukan permohonan dan mengisi lembaran pemohon yang terdiri atas: identitas, alamat pengirim, jenis yang dikirim, tujuan pengirim. Biasanya pengirim harus melaporkan diri 2 hari sebelum mengirim. Bagi PAP dan Expedisi yang mempunyai barang tidak layak di kirim maka barangnya akan dimusnakan. Biasanya di daerah lain, ada peraturan khusus sesuai dengan undang-undang, sedangkan di Sikka disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari pelanggan.

Khusus untuk pengiriman komoditas pertanian harus ada surat keterangan izin keluar dari Pemda Sikka. Untuk mendapatkan surat keterangan izin keluar ini tidak dipungut biaya, dan waktu untuk mengurusnya 1 hari. Untuk komoditas hasil hutan harus memiliki Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH). Dalam hal ini Pengusaha hanya melaporkan jenis komoditi yang akan dikirim yang terdiri atas: nama pemilik, daerah tujuan, jenis barang dan jumlah. Selain dokumen-dokumen tersebut diatas, pelaku usaha juga harus menyiapkan 3 izin yakni: SITU, SIUP, HO dan melakukan MOU antar perusahaan dengan Pemda Sikka. Pedagang Antar Pulau dan perusahaan Expedisi yang tidak mengikuti aturan akan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha di Sikka, sedangkan bagi investor akan di berhentikan izin usahanya.

#### **4.6 Identifikasi Faktor Eksternal Pengembangan Kakao di Sikka**

Identifikasi faktor eksternal meliputi: (1) kependudukan; (2) kondisi sarana dan prasarana; (3) kondisi ekonomi; (4) akses ke sumber modal; (5) posisi tawar petani; (6) introduksi teknologi; (7) pembinaan oleh petugas; (8) perusahaan mitra;

(9) kebijakan otonomi daerah; dan (10) liberalisasi ekonomi. Secara ringkas dapat disampaikan bahwa hasil identifikasi menunjukkan bahwa untuk aspek peluang (opportunity) lebih tinggi dari pada faktor eksternal ancaman (threat). Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa wilayah setempat memiliki potensi dukungan peluang relatif besar dalam pengembangan agribisnis kakao dibandingkan faktor ancaman.

#### **Kependudukan dan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Salah satu faktor yang berkaitan erat dengan kependudukan adalah sumberdaya manusia. Terkait dengan itu, sumberdaya manusia (petani) di Kab. Sikka boleh dikatakan memiliki banyak pengalaman dalam pengelolaan usahatani kakao. Jenis tanaman ini sudah mereka budidayakan sejak belasan bahkan ada yang sudah di atas dua puluh tahun. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sumberdaya manusia yang berpengalaman dalam usahatani kakao cukup banyak ditemui di Sikka. Akan tetapi, para tenaga muda usia cenderung kurang berminat terjun dalam bidang pertanian. Mereka relatif lebih tertarik bekerja di sektor nonpertanian.

Meskipun memiliki pengalaman yang cukup dalam budidaya kakao, namun sebagian besar dilakukan secara tradisional belum mengikuti praktik bercocok tanan dengan baik (Good Agriculture Practices – GAP). Pengetahuan teknis yang dimiliki petani masih kurang. Hal ini terlihat dari kebiasaan untuk merawat kebun masih sangat kurang. Sanitasi kebun sangat buruk dengan tumpangsari dan tumpang tindih berbagai macam tanaman sehingga terjadi persaingan alam untuk memperoleh unsur hara, air, udara dan cahaya matahari. Tidak dilakukan pemupukan secara tepat (tepat dosis, tepat jenis pupuk, tepat waktu dan tepat cara aplikasi). Diabaikannya konservasi tanah dan air sehingga tanaman mengalami defisiensi unsur hara dan air, terutama pada musim kemarau.

Petani beranggapan menebang pohon adalah tabu karena ikatan emosional yang kuat dengan tanaman yang telah memberikan penghidupan kepadanya, selain itu ada keawatiran bila menebang pohon akan kehilangan pendapatan selama pohon yang baru belum berproduksi. Tidak adanya insentif/

subsidi dari pemda bagi petani yang memangkas/menebang pohon adalah faktor lainnya, sehingga khawatir sumber pendapatannya akan hilang setelah pohonnya ditebang.

Sesungguhnya petani Sikka mempunyai kemauan untuk belajar, mudah diajari, ini terbukti dengan kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar. Saat ini petani tidak melakukan proses pasca panen (fermentasi maupun pengeringan) yang baik dan melakukan pemeliharaan kebun karena kurangnya motivasi, tidak ada insentif dari pembeli – harga tinggi untuk kualitas biji kakao yang baik, kurangnya modal untuk kegiatan pasca panen. Penyebab lain karena tidak ada insentif, banyak petani tidak melanjutkan atau mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatnya dari pelatihan, meskipun dari sisi program pembinaan kepada petani yang dilakukan oleh Distanbun masih terbatas. Paling tidak hingga tahun 2012 tidak adanya program pengembangan kakao yang berkesinambungan. Program yang ada hanyalah sebagai respon terhadap program dari Pemprov, Pemerintah Pusat, atau NGO.

### **Akses Permodalan**

Kesulitan mendapatkan bibit yang sesuai dengan kondisi Sikka, dan kekurangan sarana prasarana produksi dan modal usaha. Kekurangan dana adalah satu persoalan untuk memulai dan mengembangkan usaha dalam kelompok usaha tani kakao.

Sulitnya mendapatkan pinjaman pada bank dan Dinas Koperasi dan UKM oleh prosedur yang berbelit-belit. Dari sisi petani, belum memiliki kemampuan manajerial yang baik di bidang keuangan dan organisasi sehingga mereka sulit mengembangkan sayap organisatoris dan modal usahanya. Informasi tentang program-program perbankan tidak tersampaikan dengan baik ke tingkat petani. Belum ada pihak perbankan yang langsung memberikan permodalan. Permodalan masih berupa KUR, dengan syarat yang berbelit-belit. Lembaga keuangan masih belum banyak memberikan kepercayaan kepada petani untuk mengakses kredit dikarenakan belum adanya jaminan dan penjamin yang dimiliki petani. Selain itu sosialisasi program atau produk layanan lembaga keuangan untuk petani kurang tersosialisasikan dengan baik.

Komunikasi dan sosialisasi yang kurang baik adalah salah satu penyebab kesulitan petani dalam mengakses permodalan. Dari pihak perbankan di Sikka menyatakan bahwa sudah ada skim kredit untuk petani yang disediakan oleh Lembaga keuangan Bank dan Koperasi. Namun hal ini kurang tersosialisasikan dengan baik kepada para petani. Persoalan lainnya adalah adanya distorsi oleh program-program hibah yang diselenggarakan oleh LSM, Pemerintah dan lembaga lainnya. Sehingga fasilitas yang ada belum banyak dimanfaatkan dan pengaruhnya kepada petani cukup negative yang selalu mengharapkan bantuan dari program.

Penyaluran skim kredit bekerjasama dengan pendamping (PNPM) sudah berjalan. Selain itu penggunaan APBD untuk Program Kredit Channeling yang bekerjasama dengan Bank, dengan suku bunga yang rendah. “Kasus ini sudah diimplementasikan di Kopi di Bajawa dan cukup sukses, tidak ada kredit macet”.

Sementara eksistensi sumber modal lembaga keuangan lainnya seperti pedagang dan pelepas uang cukup eksis di Sikka. Paling tidak bank seperti BRI Unit Desa ada di tingkat kecamatan, sedangkan pedagang dan pelepas uang terdapat di desa. Namun kurangnya informasi dan pengetahuan para petani serta sulitnya memenuhi persyaratan pinjaman modal dari bank, menyebabkan akses mereka terhadap lembaga ini jadi terbatas. Sementara itu sumber modal seperti pedagang apalagi pelepas uang cenderung lebih mengikat dan menyulitkan petani.

### **Pemasaran/Harga**

Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang secara langsung bersentuhan dengan perdagangan internasional yang sifatnya kompetitif. Dalam perdagangan komoditi kakao, Indonesia hanya sebagai price taker, yang tidak bisa menentukan harga dunia. Harga perdagangan kakao ditentukan dalam bursa perdagangan di New York dan London.

Pada umumnya kakao dari Sikka memiliki keunggulan spesifik, yaitu kandungan lemaknya tinggi yakni mencapai 54%, tidak mencair bila disimpan pada suhu kamar. Keterbatasan teknologi dan kapasitas petani terutama dalam pengolahan pasca panen dapat menyebabkan komoditas

---

yang dihasilkan kalah bersaing dalam liberalisasi (globalisasi) ekonomi.

Harganya berubah terus mengikuti perkembangan harga dunia yang didasarkan pada kualitas dan volume. Pada penentuan harga, berlaku formula pengurangan harga dari harga yang berlaku di New York sehingga harga lokal di tiap daerah formulanya berbeda-beda. di Tingkat lokal, harga yang diberikan kepada petani ditentukan oleh Pedagang Besar yang jumlahnya sedikit, petani tidak mendapatkan informasi harga secara baik. Sesungguhnya ada informasi harga kakao yang bisa diakses semua pihak, baik di tingkat pembeli maupun di pemerintah. Namun harga pasar komoditi hasil perkebunan yang tidak menentu, dan lemahnya petani dalam hal kepemilikan modal mengakibatkan harga cenderung semakin ditawarkan murah oleh para pemodal. Para petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Hal ini salah satunya disebabkan ketiadaan organisasi yang kuat baik untuk mengontrol harga maupun untuk mencari pemasaran yang lebih baik. Sementara Pemerintah masih kurang memberikan dukungan moril dan finansial terhadap usaha mereka selama ini. Pemerintah tidak bisa menstabilkan harga dan tidak bisa mengintervensi pasar. Selain tidak ada regulasi yang mengatur, juga tidak ada program yang kongkrit untuk mengatasi permasalahan harga. Masyarakat suka berutang sehingga menggadaikan barangnya terlebih dahulu, pedagang sudah keliling terlebih dahulu sebelum panen.

Usahatani kakao adalah sumber utama ekonomi rumah tangga di Sikka. Oleh karena itu, ketidakstabilan harga akan berdampak langsung, khususnya terhadap pendapatan petani. Hal negatif paling serius adalah jika terjadi penurunan harga secara drastis, dimana dampaknya dapat menurunkan pendapatan petani dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan usahatani kakao.

Dalam penjualan hasil kakao, para petani di Kab. Sikka memiliki akses langsung ke pedagang (pengumpul). Sebagian besar dari mereka dapat menjual hasil panen kakao secara bebas (tanpa ikatan) dengan pedagang. Beberapa petani di antaranya melakukan penjualan kepada pedagang

langganan mereka, dan sebagian lagi karena terikat pinjaman dengan pedagang yang bersangkutan. Terlepas dari hal tersebut, petani setempat tidak banyak punya pilihan dalam pemasaran, kecuali ke pedagang pengumpul tersebut.

Sebagian besar petani di Kab. Sikka relatif bebas memilih pedagang (pengumpul) yang menurut mereka menawarkan harga tertinggi. Namun dibalik itu posisi tawar mereka lemah karena harga secara dominan ditetapkan oleh pedagang.

Belum banyak perusahaan yang langsung masuk ke daerah penelitian (di Sikka hanya Comextra – Pernah ada PT Mars) dan petani tidak memiliki akses langsung ke perusahaan besar di Makassar. Pemerintah harus menyediakan lingkungan yang lebih baik sehingga bisa mengundang beberapa investor kakao di Kabupaten Sikka, sehingga hal dapat memotong mata rantai dari jalur distribusi cukup panjang dan merugikan bagi petani. Masalah cost and benefit adalah salah satu alasan kenapa PT. Mars menarik buying station di Flores. Untuk itu salah satu syarat untung mengundang daya tarik supaya pembeli datang ke Maumere adalah harus ada tawaran volume yang cukup dan kualitas. Setup program khususnya untuk kegiatan prosesing harus melibatkan pihak swasta/pengusaha sejak dari awal, sehingga pihak-pihak lain khususnya pemerintah dukungannya harus disesuaikan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar/pihak swasta, baik kualitas maupun kuantitas. Pembeli belum berikan harga tinggi, salah satu masalahnya adalah produk yang dijual tidak sesuai dengan kualitas.

#### **Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Di Kab. Sikka ada enam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah berpengalaman dalam pembinaan/pemberdayaan petani kakao, yakni Swisscontact, World Vision International (WVI), Caritas, YPMF, dan PLAN. Mayoritas program pengembangan kakao diinisiasi oleh 6 LSM yang ada di Sikka. Namun wilayah kerja masih terbatas, dan terbatas pada rencana program. Pengembangan program-program di bidang ekonomi belum berorientasi pada upaya untuk keluar dari garis kemiskinan.

Meski demikian LSM-LSM tersebut telah berperan dalam peningkatan produktivitas kakao, on farm hingga off farm. Dalam rangka peningkatan kapasitas petani melalui inisiasi Sekolah Lapang (SL) muncul dari LSM tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka antara lain peningkatan kualitas hidup petani, pendidikan dan kesehatan, mengupayakan pemasaran komoditi kakao, hingga pembentukan petani modern. Problemanya adalah dalam tahap awal dalam melakukan kegiatan mereka masih kurang melibatkan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan programnya. Namun dengan adanya Forum Kakao yang sudah terbentuk dibawah koordinasi Bappeda, sudah mulai terjadi koordinasi yang baik antar pihak di Sikka dalam pengembangan Kakao.

Salah satu LSM yang berpengalaman dalam hal pemberdayaan masyarakat, khususnya di Sikka, Swiss Contact. Lembaga ini sekaligus juga punya akses langsung (berafiliasi) dengan salah satu eksportir kakao, seperti PT. Mars dan Comextra. Saat ini LSM-LSM yang ada di Sikka sudah berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan petani. Di samping lembaga tersebut berperan dalam bantuan bimbingan teknis di lapang, sekaligus juga berperan dalam mempromosikan wilayah setempat kepada pihak eksportir. Secara parsial lembaga ini sudah mulai terlibat dalam kerjasama kegiatan pembinaan/pemberdayaan petani di lokasi studi. Tapi kerjasama tersebut seyogyanya diformalkan dalam bentuk nota kesepakatan agar ada tanggungjawab di masing-masing pihak, paling tidak antar pelaksana (Pemda Sikka), petani (kelompok), dan LSM.

### **Kebijakan Penerapan Bea Keluar**

Kebijakan ini bisa menjadi peluang berkembangnya industri pengolahan dalam negeri dengan mendekati diri ke sentra-sentra produksi kakao. Dengan kebijakan ini, terjadinya penurunan ekspor biji kakao dalam bentuk mentah dan mendorong hilirisasi di dalam negeri sehingga industri pengolahan kakao dalam negeri dapat berkembang dengan baik. Industri pengolahan kakao membuat Buyer Station di sentra produksi, sehingga menguntungkan petani. Penerapan kebijakan Bea Keluar dapat memutus mata rantai perdagangan sehingga harga yang didapat petani lebih baik. Sebelum penerapan BK, petani hanya menerima 80% dari harga terminal, dan

setelah BK lebih dari 90% harga terminal. Namun sayangnya peningkatan harga yang diterima oleh petani tersebut tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas. Pada sisi lain peningkatan kapasitas (kebutuhan) industri pengolahan kakao dalam negeri tidak diiringi dengan peningkatan produksi dalam negeri. Mendatang Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan biji kakaonya sendiri sehingga menjadi Negara importer biji kakao.

### **Peran Pemerintah Daerah**

Salah satu di antara aspek kebijakan otonomi daerah adalah adanya otoritas pemerintahan lokal (kabupaten) mengelola potensi sumberdaya wilayah setempat. Kondisi ini merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan usahatani kakao sebagai komoditas unggulan di daerah yang bersangkutan. Meski demikian, perlu adanya komitmen, aturan atau kebijakan yang mendukung upaya ke arah itu agar kegiatannya dapat berjalan optimal.

Peran pemda Sikka yang paling nyata adalah melalui Petugas penyuluh seperti PPL dapat dianggap sebagai salah satu media bagi para petani di Kab. Sikka untuk mendapatkan informasi dan sekaligus bimbingan dalam menjalankan kegiatan usahatani mereka. Akan tetapi selama ini petugas yang dimaksud relatif jarang memberikan bimbingan, sehingga fungsi pembinaannya boleh dikatakan belum optimal.

Program pendampingan petani yang dilakukan oleh Distanbun dan BKP2 dilakukan sebatas ketersediaan anggaran dan ketersediaan jumlah dan kapasitas PPL yang ada. Pendampingan yang dilakukan oleh PPL disesuaikan dengan keterbatasan dari sisi jumlah dan kapasitas PPL, serta sifat PPL yang polivalen/umum dan ketersediaan anggaran.

Di sisi lain kurangnya koordinasi antara Distanbun dan BKP2 salah satunya karena masih adanya ego sektoral. Untuk suatu urusan tertentu, di satu sisi masing-masing pihak merasa yang berwenang, untuk urusan yang lain menganggap merupakan kewenangan pihak yang lain.

Dalam rangka peningkatan produktivitas, metodologi sekolah lapang mulai banyak diimplementasikan di Kabupaten Sikka, dari pengamatan sementara bahwa

metode SL adalah metode terbaik, dimana mulai dengan proses transfer pengetahuan/peningkatan SDM dari petani. Saat ini sudah ada sebanyak 6 Master training dan 80 Key Farmers yaitu tenaga ahli yang mempunyai kemampuan di dalam budidaya kakao. Dengan pendekatan seperti ini, maka perlu adanya pendampingan yang berkelanjutan kepada petani.

Namun di tingkat regulasi, saat ini, belum ada dukungan regulasi yang memadai terkait Aspek Rantai Nilai Budidaya Kakao di Sikka. Akibat Ketidadaan regulasi menyebabkan program pengembangan kakao tidak berkesinambungan. Regulasi lainnya adalah Peraturan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan Kab. Sikka No.520 01/01/SEKR/2009 tentang Rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Peternakan Kab. Sikka 2009-2013. Regulasi ada tetapi tidak ada follow-up setelah adanya restrukturisasi SKPD yang berwenang menangani pengembangan usaha kakao ini.

Meskipun tidak cukup kuat, namun ada satu regulasi yakni SK Bupati No.245/HK/2012 tentang Pembentukan Dewan Kerjasama Ekonomi Daerah (DKED) Kab. Sikka, dalam DKED ini dibentuk Forum Kakao Sikka. Forum Kakao Sikka merupakan forum stakeholders kakao yang terdiri dari Pemda (masing-masing SKPD terkait), Petani/Gapoktan, Perusahaan, Pedagang, Koperasi, Perbankan, dll).

Kurangnya koordinasi program-program pengembangan dan implementasi program diantara para stakeholder merupakan salah satu akar permasalahan kurang optimalnya pengembangan kakao di Sikka. Peningkatan dan optimalisasi koordinasi antar pihak diperlukan untuk upaya-upaya peningkatan produktivitas kakao di Sikka. Sesungguhnya di Sikka sudah ada satu institusi yang berfungsi untuk mengkoordinasikan stakeholder, baik dari unsur pemerintah, swasta, petani, LSM dan sebagainya dalam rangka pembangunan ekonomi, yakni DKED. DKED dibentuk berdasarkan SK Bupati No.245/HK/2012 tentang Pembentukan Dewan Kerjasama Ekonomi Daerah (DKED) Kab. Sikka. Dalam DKED ini dibentuk Forum Kakao Sikka, yang berfungsi untuk mencari solusi permasalahan dari usaha kakao. Mengingat strategisnya peran DKED,

maka revitalisasi DKED melalui penguatan dasar hukum menjadi relevan sebagai salah satu opsi tindakan.

Sebagai gambaran berikut ini adalah peran dari DKED:

- Memberikan masukan, usul-saran permasalahan ekonomi daerah serta berperan dalam merumuskan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian;
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, memfasilitasi kajian-kajian potensi dan peluang perekonomian lokal untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat;
- Menjadi mediator antara BUMN/BUMD, swasta dan stakeholders dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program umum perekonomian daerah.

Revitalisasi DKED dapat dilakukan dengan membuat Perda/Perbub yang didalamnya antara lain untuk: Memperjelas, Mempertegas, dan Memperluas cakupan/fungsi, Struktur, Kewenangan DKED.

Komitmen pemerintah sangat rendah dalam hal pendanaan untuk pengembangan kakao di Sikka harus diakui disebabkan karena secara kelembagaan Perkebunan tidak menjadi Dinas sendiri, sehingga alokasi dananya pun menjadi sangat terbatas. Padahal jika kakao dipandang sebagai sub sektor ekonomi andalan yang signifikan berpengaruh terhadap perekonomian mestinya mempunyai pembiayaan yang khusus.

Regulasi yang ada hanya terkait dengan Kakao adalah Perda No.4 Tahun 2008 (SOTK Dinas PTP3) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kab. Sikka, sub sektor usaha perkebunan dibawah Bidang perkebunan pada Dinas PTP3. Terdapat 3 seksi: Sesi Produksi Perkebunan; Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; Sesi Penerapan Teknologi Perkebunan.

Di tingkat implementasi program yang ada, permasalahan Ego Sektoral menjadi kendala dalam pengembangan kakao di Sikka. Hal ini terlihat dari ketiadaan koordinasi antar SKPD, sehingga setiap SKPD bisa saja menjalankan program/kegiatan yang bukan menjadi fungsinya. Masing-masing SKPD memiliki perbedaan persepsi mengenai Tupoksi (Disbuntan dengan BKP2 terkait PPL), sehingga implementasi program tidak berjalan optimal dan hasilnya kurang efektif. Kedepannya harus ada upaya untuk memperkuat DKED sebagai media koordinasi dalam pengembangan kakao di kab. Sikka dan merumuskan program bersama.

Harus ada desain program yang mensinergikan program antar stakeholder kakao. Banyak program pengembangan kakao yang dilakukan oleh stakeholder di Kab. Sikka seperti Pemerintah, LSM, dll, namun masih bekerja sendiri-sendiri (ego sektoral masih kuat), setiap stakeholder mau lebih menonjol. Program yang sementara, tidak berjangka panjang dan tidak berkesinambungan yang menyebabkan program kurang berdampak. Semestinya pendampingan dari hulu ke hilir, sehingga bisa lebih memberikan motivasi kepada petani. Dalam implementasi program termasuk GERNAS kurang memberdayakan PPL yang ada.

Kakao adalah produk ekspor yang mengacu kepada fluktuasi harga dunia, sehingga harga tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adanya upaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk cross check harga lokal dengan harga di luar. Implementasi kebijakan belum dikoordinasikan dengan kebijakan yang lain yang terkait.

### **Kelembagaan Ekonomi**

Di Kabupaten Sikka, belum ada Koperasi Produksi, yang ada hanya Koperasi Simpan Pimjam. Namun di tengah masyarakat masih ada persepsi negatif terhadap koperasi. Koperasi tidak dipercaya karena jalur pemasarannya tidak jelas dan tidak transparan. Selain koperasi ketiadaan koperasi produksi, petani belum terorganisir sehingga tidak bisa mengintervensi harga. Kesadaran petani/anggota kelompok untuk melakukan pemasaran/penjualan

bersama masih kurang. Gapoktan terbentuk untuk kepentingan proyek instansi tertentu pemerintah (kehutanan, pertanian, perkebunan, dll.) hanya untuk penyaluran dana sesaat, bukan untuk usaha pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini diharapkan peran pemerintah, namun sayangnya belum ada regulasi dan program pemerintah terkait pemasaran dan kelembagaan ekonomi petani. Belum ada lembaga yang memperkuat peran petani seperti koperasi ataupun asosiasi, mengakibatkan petani tidak memiliki kekuatan di pasar ataupun terlindungi, dan hanya bertindak sebagai price taker. Dengan lemahnya kekuatan petani di pasar, kapasitas untuk memenuhi kontrak langsung dengan pabrik juga tidak ada.

Pengalaman bahwa banyaknya koperasi kecil yang tidak berjalan dengan baik dan dilembagakan karena adanya program mengakibatkan keberlangsungannya kurang terjamin. Di sisi lain, adanya kelembagaan petani yang jelas dalam bentuk koperasi adalah untuk menjawab tantangan pasar yang lebih senang berhubungan dengan kelompok atau koperasi dan juga salah satu untuk syarat akses ke lembaga keuangan khususnya Bank untuk working capital untuk kegiatan pemasaran bersama. Tetapi, keputusan untuk melembagakan kelompok kecil menjadi koperasi perlu di pertimbangkan lagi, apakah betul koperasi kecil bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini ada wacana untuk mengaktifkan modal „Koperasi Unit Desa (KUD)“. Namun dalam implementasinya perlu adanya pendampingan manajemen bisnis untuk kelompok tani/koperasi, sehingga keberadaan kelompok lebih bisa dipercaya.

Semua petani tergabung dalam poktan, tetapi kenyataannya tidak semua poktan aktif yang menyebabkan rendahnya motivasi petani untuk bergabung di poktan. Seringkali program-program yang datang ke desa membentuk kelompok yang baru dan tidak ada koordinasi, hal ini cukup membingungkan petani dan juga akan banyak organisasi petani dengan tujuan sama. Pendamping disarankan tidak membentuk organisasi yang baru tetapi memperkuat organisasi „poktan“ maupun „GAPOKTAN“.

#### 4.7 Analisis Strategi Pengembangan

Permasalahan agribisnis kakao di Kab. Sikka dapat dikelompokkan menjadi empat aspek, yakni: (1) produksi; (2) pascapanen; (2) sarana dan prasarana;

dan (4) kelembagaan. Permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan yang terkait dengan rantai nilai budidaya kakao di Sikka secara ringkas terangkum dalam matriks di bawah ini.

**Tabel 2. Matriks Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Rantai Nilai Kakao Di Kabupaten Sikka**

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>SARANA PRODUKSI:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya ada dua toko komersial yang menyediakan pupuk dan saprodi.</li> <li>Keterbatasan pupuk bagi petani</li> <li>Keterbatasan pestisida organik bagi petani.</li> <li>Keterbatasan saprodi/ alat-alat seperti sprayer (alat penyempot pestisida), gunting bagi petani.</li> <li>Kelangkaan/tidak ada bibit kakao yang cocok dengan iklim di Sikka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supply saprodi kebanyakan diambil dari Jawa.</li> <li>Pupuk dirasa oleh petani masih mahal.</li> <li>Pupuk belum tersedia secara tepat; Pupuk umumnya dipakai untuk tanaman pangan.</li> <li>Entries unggul tidak tersedia di tempat yang dekat.</li> <li>Akses petani terhadap permodalan/kredit komersial untuk modal usaha masih sangat kurang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam penyediaan sarana produksi, pupuk, bibit, dan lainnya, petani masih mengandalkan subsidi dari pemerintah, program LSM dan gereja.</li> <li>Rendahnya kemampuan finansial petani untuk membeli pupuk.</li> <li>Petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga subsidi di Toko Dirgahayu dengan melampirkan surat rekomendasi dari Distanbun tetapi dengan prosedur yang sulit.</li> <li>Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan stakeholder dalam penyediaan sarana produksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan sumber-sumber lain dalam penyediaan saprodi sehingga harga lebih kompetitif.</li> <li>Perlunya kerjasama Pemda Prov/Kota dan Litbang dan Puslit Koka ((Pusat penelitian kopi dan kakao) untuk pengembangan bibit lokal.</li> <li>Perlunya kerjasama dengan lembaga keuangan dalam hal permodalan, misal kredit kolektif melalui poktan.</li> <li>Pembuatan dan penggunaan pupuk organik.</li> <li>Koordinasi antar stakeholder baik di pemerintahan maupun di luar pemerintah untuk penyediaan sarana produksi melalui DKED.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemprov</li> <li>Pemda Kabupaten (Distanbun, BKP2).</li> <li>UPH</li> <li>Perbankan</li> <li>DKED</li> </ul>
<b>BUDIDAYA / USAHA PERKEBUNAN:</b>				
<p>Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produktivitas Kakao Rendah: kuantitas dan kualitas produksi kakao mengalami penurunan sekitar 30-40% yakni produktivitas 1.500-1.700 kg/ha 300-400 kg/ha);</li> <li>Produksi kakao di Sikka sampai dengan tahun 2003 = 14.333,2 ton dengan nilai nominal Rp.372.663.200.000,- à Mulai tahun 2004 produksi kakao terus menurun hingga 54% atau 7.739,93 ton atau setara kehilangan PDRB Rp.201,2 Milyar per tahun.</li> <li>Mutu kakao rendah (kadar air sekitar 30-35%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar tanaman kakao sudah tua (&gt;20th).</li> <li>Hama dan penyakit yang menyerang buah kakao: HPT (busuk buah, PBK, dan kanker batang).</li> <li>Belum banyak Petani yang melakukan perawatan kebun secara baik (Good Agricultural Practicess-GAP).</li> <li>Kurangnya kesadaran petani untuk pengelolaan, merawat kebun dan pemupukan secara optimal.</li> <li>Peremajaan masih sedikit dan saat ini dilakukan dengan teknik sambung samping dan sambung pucuk. Tingkat keberhasilan teknik sambung samping dan sambung pucuk ini diakui lebih berhasil dibandingkan pembibitan.</li> <li>Keengganan petani untuk melakukan penebangan dan peremajaan tanaman kakaonya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teknik pengendalian HPT, sanitasi, dan penanganan limbah belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan petani.</li> <li>Petani tidak ada/belum tahu sistem penggantian (rehabilitasi) yang tepat.</li> <li>Belum memakai teknik pemupukan yang tepat.</li> <li>Kurangnya pengetahuan petani untuk melakukan peremajaan dan perawatan kebun.</li> <li>Tidak adanya insentif/ subsidi dari pemda bagi petani yang merehabilitasi pohon, sehingga khawatir kehilangan sumber pendapatannya selama pohon belum menghasilkan kembali.</li> <li>Kesulitan mendapatkan bibit yang sesuai dengan kondisi Sikka.</li> <li>Kekurangan sarana prasarana produksi dan modal usaha.</li> <li>Kurangnya koordinasi antar pihak yang berwenang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan secara intensif kepada petani untuk mengimplementasikan GAP.</li> <li>Perlunya peningkatan pengetahuan petani untuk menggunakan pupuk.</li> <li>Peremajaan kebun mandiri melalui sambung samping/sambung pucuk oleh petani.</li> <li>Penguatan kelembagaan &amp; kapabilitas penyuluh bidang kakao secara berkelanjutan.</li> <li>Mengoptimalkan koordinasi antar stakeholder yang diwadahi dalam DKED.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda (Distanbun)</li> <li>Penyuluh (BKP2)</li> <li>DKED</li> <li>Petani/ kelompok tani.</li> <li>LSM</li> </ul>

<p>Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok tani modern masih sedikit.</li> <li>• Sudah ada Sekolah Lapang (SL) yang tenaga pendidikannya merupakan petani lokal yang telah diseleksi oleh Pemda dan Buyer, tetapi perannya belum dioptimalkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani umumnya anggota koperasi, tapi kegiatannya hanya simpan pinjam.</li> <li>• Belum ada koperasi jasa usaha dan koperasi produksi, yang dapat digunakan untuk menjadi lembaga untuk pemasaran kakao oleh petani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok tani belum berfungsi optimal.</li> <li>• Keterbatasan lembaga penyedia modal.</li> <li>• Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pihak (pemerintah, kelompok tani, swasta, NGO).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan kelompok tani modern, sebagai upaya pemberdayaan petani menjadi lebih terarah dan pembinaan dari Pemda secara kontinyu.</li> <li>• Penguatan UPH sebagai wadah petani untuk melakukan pemasaran bersama.</li> <li>• Penguatan kelompok tani melalui fasilitas dan permodalan sehingga kelompok tani dapat membeli putus kakao basah untuk dikeringkan dan fermentasi bersama secara lebih baik dan efisien.</li> <li>• Optimalisasi peran dan fungsi DKED dalam mengkoordinasikan stakeholder yang berkompeten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda (DKED)</li> <li>• LSM</li> <li>• Kelompok Tani</li> <li>• UPH</li> </ul>
<p>Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan keterampilan petani masih terbatas.</li> <li>• Keterbatasan kapasitas (kemampuan) dan jumlah tenaga penyuluh (PPL)</li> <li>• Penguatan kapasitas petani lebih banyak dilakukan melalui program-program NGO yang ada di Sikka dengan cakupan yang terbatas dan tingkat keberlanjutan sesuai dengan durasi program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran petani untuk menggunakan pupuk kurang.</li> <li>• Budidaya kakao masih dilakukan secara tradisional, pengetahuan petani masih rendah dalam hal budi daya, sanitasi, fermentasi, pemasaran, dan kualitas biji kakao yang diminati pasar.</li> <li>• Kurangnya kesadaran petani untuk merawat kebunnya.</li> <li>• Ketergantungan petani untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah/Pemda.</li> <li>• Budaya kelompok untuk menanam bersama "sakoseng" mulai berkurang.</li> <li>• Keengganan petani untuk melakukan pemasaran bersama sehingga harga tawar petani rendah.</li> <li>• Keengganan petani untuk datang ke pelatihan, hanya pada saat rapat dengan pemda untuk mendapat uang duduk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi dan manfaat kelompok belum dipahami.</li> <li>• Organisasi kelompok belum sempurna.</li> <li>• Koperasi belum berfungsi optimal.</li> <li>• Lembaga pemasaran belum terorganisir.</li> <li>• Program pendampingan petani yang dilakukan oleh Distanbun dan BKP2 dilakukan sebatas ketersediaan anggaran dan ketersediaan jumlah dan kapasitas PPL yang ada.</li> <li>• PPL yang tersedia bersifat polivalen/umum dan ketersediaan anggaran.</li> <li>• Dengan desain kelembagaan Distanbun menyebabkan kurang leluasa untuk pengembangan kakao khususnya untuk penyusunan program dan alokasi anggaran.</li> <li>• Kurangnya koordinasi antara SKPD dalam melaksanakan program dan optimalisasi sumber daya yang ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan petani atas standar biji kakao yang dibutuhkan pabrikan dan harga biji kakao di pasaran.</li> <li>• Meningkatkan motivasi petani kakao untuk mengimplementasikan GAP.</li> <li>• Motivasi untuk meningkatkan luas areal perkebunan usaha mereka.</li> <li>• Perlu dukungan modal bagi petani dan mendorong petani untuk beli putus kakao basah petani untuk di produksi bersama.</li> <li>• Optimalisasi peran master training dan petani andalan untuk difungsikan dalam melakukan diklat kepada petani lainnya dalam satu kelompok.</li> <li>• Penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapabilitas dan jumlah tenaga penyuluh bidang kakao secara berkelanjutan.</li> <li>• Strategi penyuluh dapat diubah dengan mendatangi petani secara berkala, sebagai upaya memberikan motivasi kepada petani dan sebagai sarana transfer teknologi yang lebih efektif.</li> <li>• Peningkatan dan optimalisasi koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan petani dan kelompok tani (Distanbun, BKP2, DKED)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda (DKED)</li> <li>• Penyuluh/BKP2</li> <li>• UPH</li> <li>• Gereja/Tokoh Masyarakat</li> <li>• Petani</li> <li>• LSM</li> <li>• Lembaga keuangan dan perbankan.</li> </ul>
<b>PENGLOLAAN PASCA PANEN</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan pasca panen, seperti pengeringan dilakukan secara tradisional didepan rumah/aspal tanpa memperhatikan faktor sanitasi. Idealnya diperlukan adanya lantai jemur atau para-para.</li> <li>• Kebanyakan petani hanya mengeringkan 1 hari kemudian langsung jual ke pedagang desa.</li> <li>• Baru sebagian kecil kelompok tani yang menggunakan teknologi sederhana untuk pengeringan, "tedeng koko"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin pengering dari Pemerintah tidak digunakan oleh UPH, karena waktu lebih lama, mesin dengan kapasitas besar justru tidak efektif karena harus menampung kakao dari banyak petani dengan kualitas yang berbeda-beda dan biaya produksi lebih mahal.</li> <li>• Kendala pembuatan tedeng koko, adalah mahalnya plastik UV yang digunakan sebagai penutup.</li> <li>• Buyer besar seperti PT Mars &amp; Comextra memberikan cairan khusus yang digunakan pada saat pengeringan untuk memberikan aroma lebih kuat pada kakao.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi pengeringan masih sederhana.</li> <li>• Petani memerlukan uang tunai (cash money) segera untuk memenuhi kebutuhan hidup.</li> <li>• Tidak melakukan fermentasi karena makan waktu dan tidak ada insentif harga</li> <li>• Organisasi dan manfaat kelompok belum difahami.</li> <li>• Kurangnya pendampingan dan penyuluhan dari Pemda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan kualitas kakao sesuai minat pasar dan bantuan alat.</li> <li>• Pemda bekerja sama dengan LSM, buyer besar atau lembaga keuangan untuk penyediaan alat pengering sehingga tiap poktan memilikinya sehingga pemanfaatan dan penggunaan alat pengering lebih luas dan yang lebih baik.</li> <li>• Pembinaan kelompok yang berkelanjutan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola kemitraan</li> <li>2. Penguatan lembaga pemasaran petani</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda</li> <li>• LSM</li> <li>• Lembaga keuangan</li> <li>• Buyer</li> <li>• DKED</li> </ul>

PEMASARAN DAN HARGA JUAL				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga kakao fluktuatif mengikuti harga bursa komoditi New York: Harga di tingkat petani adalah Rp 13 ribu untuk kakao setengah basah (pengeringan 1hari); Rp 17-18 ribu untuk tester 7 (pengeringan 3-4 hari), sementara harga jual di tingkat buyer besar Rp 21ribu.</li> <li>• Petani lebih suka menjual langsung kepada pedagang desa, meskipun harga rendah karena dorongan kebutuhan.</li> <li>• Tingkat pengetahuan petani akan kualitas biji kakao yang sesuai dengan standar / kebutuhan pasar masih rendah.</li> <li>• Masih ada sistem ijon dari pedagang pengepul.</li> <li>• Infrastruktur yang masih kurang memadai untuk sebagian wilayah sentra produksi kakao.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi tawar petani dalam menentukan harga jual kakao sangat rendah. Ada kecenderungan pedagang pengumpul biasanya mem-permainkan harga.</li> <li>• Akses petani untuk mendapatkan informasi harga sangat terbatas. Meskipun ada fasilitas sms, namun belum semua petani memanfaatkan media sms untuk menanyakan harga internasional dan lokal yang berlaku.</li> <li>• Volume yang dihasilkan individu petani masih sedikit, sehingga tidak mungkin bisa langsung akses kepada pedagang besar.</li> <li>• Kualitas biji kakao yang dihasilkan (pasca panen) masih rendah sehingga harga jual juga rendah.</li> <li>• Pedagang pengepul datang tiap pagi dan sore, sehingga banyak petani yang tertarik untuk jual langsung di tempat.</li> <li>• UPH belum dioptimalkan dalam rantai pemasaran. Seharusnya dalam fermentasi dan pengeringan bersama pedagang/ kelompok tani, peran UPH perlu ditingkatkan lagi dalam membeli putus kakao dalam kondisi basah.</li> <li>• Sebaran daerah tanaman kakao yang sangat luas sehingga secara teknis sulit untuk diupayakan pemasaran bersama, dan luasan kepemilikan lahan yang sempit sehingga produksinya kecil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi dan manfaat kelompok belum dipahami</li> <li>• Belum tersedianya koperasi yang berfungsi untuk melakukan pemasaran anggota koperasi.</li> <li>• Kurangnya insentif bagi petani untuk melakukan pengelolaan biji kakao lebih baik.</li> <li>• Tidak ada mekanisme pengaman ekonomi untuk menjamin kebutuhan hidup petani.</li> <li>• Kurangnya dukungan/ keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran Pemda dalam memfasilitasi dan mendorong petani untuk melakukan pemasaran bersama sebagai upaya peningkatan daya tawar petani.</li> <li>• Peningkatan peran pemda dalam mendorong dan membimbing petani untuk meningkatkan mutu kakao dengan GAP dan pengolahan pasca panen yang lebih baik, dan untuk menjual dengan kualitas biji kakao pengeringan sempurna dan sesuai standar pasar internasional sehingga harga lebih tinggi.</li> <li>• Melakukan pemasaran bersama baik dalam kelompok tani maupun melalui koperasi.</li> <li>• Penguatan UPH sebagai penampung hasil petani.</li> <li>• Peningkatan peran Pemda melalui strategi alternatif dengan mengembangkan regulasi yang ada seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Resi gudang: untuk menampung hasil petani sebagai upaya lindung harga jika harga turun (mengadopsi praktik yang dilakukan di Ghana dan Pantai Pading)</li> <li>2. Mengembangkan sistem pemasaran bersama yang dikelola oleh BUMD</li> <li>3. Melaksanakan lelang forward kakao,</li> <li>4. Penetapan harga jual kakao minimum, penguatan peran pemda dengan membentuk lembaga seperti Bulog atau kebijakan yang mengharuskan peran swasta membeli kakao dengan harga minimum, dll</li> </ol> </li> <li>• Peningkatan kapasitas petani dalam penggunaan media komunikasi dan akses terhadap informasi terkait kakao yang sedang berkembang.</li> <li>• Intervensi stakeholder industri konsumsi di luar Sikka.</li> <li>• Peningkatan efisiensi di tingkat pedagang.</li> <li>• Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi ke pasar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda</li> <li>• DKED</li> <li>• Petani</li> <li>• Local trader's</li> <li>• Pedagang besar</li> <li>• Lembaga keuangan Perbankan</li> <li>• Koperasi</li> <li>• Petani</li> <li>• LSM</li> </ul>

Secara garis besar pokok permasalahan agribisnis kakao di Kab. Sikka adalah: (1) produksi: kuantitas dan kualitas produksi kakao mengalami penurunan sekitar 30-40% (dari 900-1200 kg/ha menjadi 450 kg/ha); (2) pascapanen: mutu kakao rendah (kadar air sekitar 30-35%), sehingga harganya juga rendah; (3) sarana dan prasarana: transportasi sarana produksi dan hasil terganggu atau kurang lancar; dan (4) kelembagaan: kelompok tani belum berfungsi optimal, penyalur sarana produksi yang lengkap berada di luar desa, dan keberadaan lembaga penyedia modal terbatas.

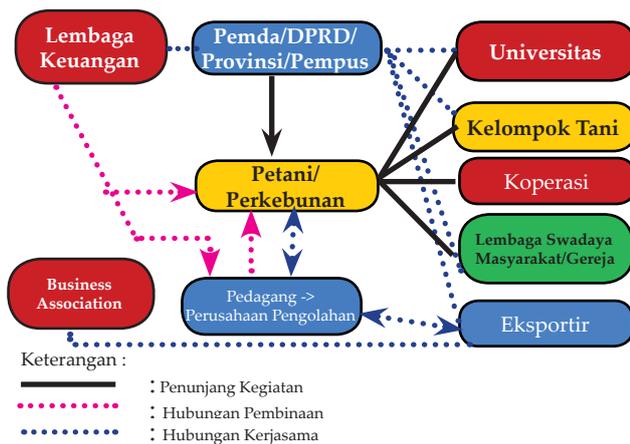
Secara garis besar, inovasi yang dibutuhkan sebagai alternatif pengembangan agribisnis kakao di Kab. Sikka terkait dengan beberapa aspek, yaitu: (1) Produksi: kebutuhan inovasi meliputi Sekolah Lapang, teknik peremajaan tanaman, penyediaan sumber entris, analisis rekomendasi pemupukan, dan perbaikan sistem drainase; (2) Pascapanen: dalam kegiatan ini diperlukan inovasi seperti perbaikan teknologi pascapanen untuk pengeringan dan sortasi serta teknologi pengolahan; (3) Sarana dan Prasarana: program pembangunan jalan, jalan poros desa, dan jembatan merupakan salah satu

prasyarat utama untuk menunjang percepatan inovasi; dan (4) Kelembagaan: aspek ini memerlukan inovasi yang terkait dengan pembinaan kelompok yang berkelanjutan, pola kemitraan, dan penguatan lembaga pemasaran petani.

#### 4.8 Stakeholders dan Peranannya dalam Rantai Nilai Kakao di Sikka

Perkembangan agribisnis kakao di Kab. Sikka melibatkan secara aktif partisipasi beberapa pihak (stakeholders) seperti kelompok tani sebagai sentral atau fokus kegiatan: Petani sebagai fokus dari program inti, serta pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga lainnya sebagai unsur penunjang. Mekanismenya diilustrasikan pada Gambar 4 berikut ini:

Gambar 4. Stakeholders Usaha Kakao di Kabupaten Sikka



Dari masing-masing anggota stakeholder tersebut memiliki peran masing-masing. Dalam menjalankan perannya, ada stakeholder yang sudah berperan yang secara baik dan signifikan mempengaruhi perkembangan usaha kakao di Sikka. Namun di sisi lain masih ada yang belum berperan sebagaimana yang diharapkan.

##### Petani/Kelompok Tani

Pada hakekatnya kelompok tani adalah organisasi yang memiliki fungsi sebagai media musyawarah petani. Di samping itu, organisasi ini juga memiliki peran dalam akselerasi kegiatan program pembangunan pertanian. Namun banyak kasus ditemui bahwa kelompok tani dibentuk dalam kaitannya dengan implementasi program. Akibatnya,

eksistensi kelompok tani yang demikian itu sering berakhir seiring selesainya kegiatan program. Akibat lebih luas, manfaat program hanya dirasakan pada saat implementasi tanpa keberlanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, eksistensi kelompok tani harus dilandasi oleh prinsip partisipatif. Dengan kata lain kelompok tani dibentuk oleh petani sendiri, sementara pihak luar hanya berperan sebagai fasilitator. Hal yang perlu digarisbawahi adalah perlu adanya pembekalan kelompok tani yang sekaligus difasilitasi oleh fasilitator. Materi pembekalan yang perlu disiapkan adalah yang berkaitan dengan pemberdayaan seperti fungsi, tugas, perencanaan, pengawasan, dan lain-lain, sehingga kelompok tani dapat tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mandiri (empowered). Hendaknya pembekalan ini tidak hanya difasilitasi oleh fasilitator atau tim pakar saja, tetapi juga dengan mengundang pihak-pihak lain (stakeholders) dari unsur penunjang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Sekaligus kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu ajang pertemuan untuk saling berintegrasi antar semua pihak guna mengembangkan agribisnis kakao.

##### Pemerintah Daerah

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pihak pemerintah setempat memiliki peran yang lebih besar dalam memajukan daerahnya. Oleh karena itu, pengembangan agribisnis kakao merupakan salah satu peluang untuk memajukan daerah setempat. Instansi-instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, atau DPRD setempat dapat dianggap sebagai lembaga yang semestinya bisa berpartisipasi dalam implementasi langkah operasional pengembangan agribisnis kakao ini.

##### Lembaga Perbankan

Sektor perbankan selama ini telah terbukti sebagai salah satu pilar dalam menyokong pembangunan ekonomi. Namun keterlibatan sektor terkait dalam bidang pertanian relatif terbatas pada kegiatan skala usaha besar, antara lain untuk eksportir atau perkebunan besar. Peran lembaga perbankan untuk skala usaha kecil seperti petani di pedesaan boleh dikatakan langka. Paling menonjol hanya sebatas

---

bantuan penyaluran kredit usahatani seperti yang pernah dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bantuan kredit permodalan banyak ditemui pada pengusaha nonpertanian dan jarang sekali untuk petani, yang sebetulnya juga dapat dikategorikan sebagai pengusaha pertanian. Padahal selama ini petani diketahui sebagai pihak yang selalu lemah dalam permodalan dan proses transaksi pemasaran.

Fenomena diatas lazim terjadi mengingat perbankan sendiri adalah lembaga profit yang sudah barang tentu tidak mau menanggung risiko kerugian. Selama ini salah satu faktor kelemahan petani adalah tidak adanya kepastian (uncertainty) terhadap hasil usahatannya yang tidak bisa disimpan lama (perishable). Di samping itu petani sendiri cenderung bertindak sendiri-sendiri atau minimal hanya melakukan kegiatan kolektif secara nonformal dan terbatas.

Satu peluang yang perlu ditindaklanjuti di Kab. Sikka saat ini adalah kerjasama dengan PT. Bank BNI. Diskusi awal dengan pihak Bank tersebut mengisyaratkan bahwa lembaga terkait membuka kesempatan untuk diajak berpartisipasi dalam langkah operasional pengembangan agribisnis kakao. Hal tersebut sesuai dengan salah satu skim yang dimiliki PT. BNI sendiri, yaitu skim mikro yang ditujukan untuk unit kegiatan skala kecil di akar rumput (grass root). Bentuk pembiayaannya dapat dalam kategori bagi hasil atau jual beli komoditas. Kategori pertama didasari atas kelayakan usaha, sementara kategori kedua berlandaskan kesepakatan harga (fixed price).

Namun di atas semua itu, perlu dicatat bahwa selama ini pihak perbankan banyak yang menilai petani sebagai pihak yang masih diragukan karakter dan kapabilitasnya dalam memenuhi persyaratan perbankan. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah melalui jalinan kerjasama dengan pihak tertentu (pedagang/perusahaan) yang membeli produk kakao dari kelompok tani dan sekaligus bertindak sebagai avalis (penjamin kredit) di bank.

### **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Terdapat enam LSM yang aktif berperan dalam pendampingan dan pengembangan usaha kakao di Sikka. Salah satu LSM yang berpengalaman

dalam hal pemberdayaan masyarakat, khususnya di Sikka, Swiss Contact. Lembaga ini sekaligus juga punya akses langsung (berafiliasi) dengan salah satu eksportir kakao, seperti PT. Mars dan Comextra. Saat ini LSM-LSM yang ada di Sikka sudah berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan petani. Di samping lembaga tersebut berperan dalam bantuan bimbingan teknis di lapang, sekaligus juga berperan dalam mempromosikan wilayah setempat kepada pihak eksportir.

### **Eksportir**

Dilihat dari sisi perdagangan, satu di antara perusahaan eksportir yang eksis di Kab. Sikka adalah PT. Comextra, dan PT. Mars eksportir ini berkedudukan di Makassar dan sekaligus memiliki hubungan langsung dengan pedagang-pedagang di Sikka. Oleh karena itu, peran perusahaan yang bersangkutan diharapkan bisa berintegrasi dalam langkah operasional pengembangan agribisnis kakao.

### **Pedagang/Perusahaan**

Selama ini banyak tudingan yang diarahkan kepada para pedagang sebagai pihak yang sering mengambil keuntungan besar dari pembelian komoditas pertanian dibandingkan tingkat keuntungan yang diperoleh petani sebagai produsen. Tingkat dan harga lebih dominan ditentukan mereka, sehingga posisi tawar menawar petani acapkali jadi lemah. Oleh karena itu, peran serta pedagang dalam langkah operasional pengembangan agribisnis kakao ini perlu diupayakan. Salah satu bentuk konkritnya adalah dengan mengajak pedagang (perusahaan) tertentu dalam kegiatan terkait dan sekaligus diharapkan berperan sebagai avalis untuk petani setempat. Unsur penyokongnya dapat diperkuat dengan melibatkan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Gambaran bagaimana peran masing-masing *stakeholders*, dan peran apa lagi yang diharapkan kedepannya untuk lebih optimal lagi dapat dilihat pada Tabel 3 dihalaman berikutnya. Dalam tabel ini dapat terlihat peran *stakeholders* dan apa saja yang diharapkan kedepannya untuk mengoptimalkannya.

Tabel 3. Matriks Analisis Stakeholders Pengembangan Kakao di Kabupaten Sikka

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
Kementerian Pertanian RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu dalam peningkatan produktivitas kakao melalui Program Gernas Kakao (Gernas Kakao).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program lebih berkelanjutan dan tidak hanya program yang bersifat fisik melainkan juga lebih fokus pada peningkatan kapasitas petani.</li> </ul>
PEMROV NTT (Dinas Perkebunan Provinsi NTT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung program Gernas Pro Kakao, seperti pengadaan dan penyaluran kegiatan peremajaan (bibit SE, pupuk, insektisida, fungisida), rehabilitasi (pupuk, insektisida, fungisida) dan intensifikasi (pupuk, insektisida dan feromon)</li> <li>Mengadakan program "Anggur Merah" yang salah satu programnya adalah peningkatan kualitas hidup petani kakao. Dilaksanakan oleh Bappeda.</li> <li>Membantu Pemda dalam mendapatkan/mengajukan project dari Pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong pemda dalam pembuatan program-program pengembangan kakao, misal pemberian insentif bagi petani kakao yang mau mengembangkan sektor kakao.</li> <li>Memberikan program pendampingan dan pembinaan kepada Pemda Kab/Kota dalam mengembangkan sektor kakao. Program tersebut dapat berupa program bantuan fisik maupun program kebijakan.</li> <li>Memberikan arah alur koordinasi yang jelas antar SKPD yang terkait dengan sektor pengembangan kakao, dalam hal ini Distanbun dan BKP2 sehingga dapat memberikan pembinaan secara terpadu kepada petani kakao di daerah.</li> <li>Mengurangi ketergantungan pada bantuan program pusat.</li> </ul>
PEMDA KAB. SIKKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan pendanaan kegiatan pemberdayaan usaha kakao dalam porsi yang masih terbatas.</li> <li>Merespon kegiatan pemberdayaan kakao yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau NGO, meski sebatas menyesuaikan program. Saat ini belum ada program yang berkesinambungan sehingga program pengembangan kakao belum berjalan optimal.</li> </ul>	<p>Meningkatkan komitmen dalam pengembangan usaha Kakao, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan alokasi anggaran yang berasal dari APBD dalam rangka pengembangan usaha kakao.</li> <li>Dukungan regulasi untuk pengembangan usaha kakao, sesuai kebutuhan masing-masing aspek rantai nilai (Aspek Ketersediaan Input; Produksi; Tata Niaga/Pemasaran, dll)</li> </ul>
DEWAN KERJASAMA EKONOMI DAERAH (DKED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendirikan Forum Stakeholders Kakao.</li> <li>Peningkatan kapasitas petani dalam hal budidaya tanaman maupun pengolahan hasil termasuk pemasaran.</li> <li>Koordinasi stakeholder, membahas dan mengadakan pertemuan permasalahan kakao.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan fungsi masing-masing anggota forum stakeholder kakao dalam mendorong perkembangan usaha kakao, sesuai rantai nilai dimana mereka berperan.</li> </ul>
BAPPEDA KAB. SIKKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan program "Anggur Merah" sebagai pelimpahan tugas dari program Provinsi.</li> <li>Menjadi sekretariat (Dengan SwissContact-SC) mengkoordinasikan Dewan Kerjasama Ekonomi (DKED).</li> <li>Melalui forum stakeholders, Memobilisasi PPL dan menyediakan budget untuk operasional BPK dan PPL (Transport dan Fee).</li> <li>Seleksi Master trainers-MT, Key farmers – KF, dan memobilisasi kelompok tani.</li> <li>Memberikan dukungan langsung baik moril maupun material kepada kelompok SL serta menyediakan alokasi anggaran untuk SL</li> <li>Monitoring implementasi SL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembalikan fungsi Bappeda sebagai bidang perencana bukan implementor program.</li> <li>Mengkoordinasikan tugas dan wewenang SKPD sesuai tupoksinya.</li> <li>Memperkuat koordinasi lintas SKPD (Distanbun &amp; BKP2).</li> <li>Memperkuat peran Distanbun dalam setiap kegiatan terkait tupoksinya.</li> </ul>
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DISTANBUN) Kab. Sikka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan program Gernas dengan memberikan dana sharing untuk membiayai pelaksanaan operasional lapangan.</li> <li>Memberikan pupuk dengan harga subsidi kepada kelompok tani.</li> <li>melalui program gernas menyeleksi calon petani dan lahan sebagai area lokasi kegiatan.</li> <li>melalui program Gernas memberikan bantuan peralatan dan melaksanakan pemberdayaan kapasitas petani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat program pengembangan sektor kakao secara intensif dan kontinu.</li> <li>Berperan aktif dalam forum stakeholder.</li> <li>Berkoordinasi dengan BKP2 dan SKPD lainnya dalam melakukan pengembangan program.</li> <li>Pemda berperan dalam pemasaran dan penentuan harga pasar sehingga harga jual petani lebih baik.</li> <li>Menyediakan informasi harga pasar kakao.</li> <li>Menyediakan kerangka regulasi pengembangan sektor kakao secara terpadu termasuk kerangka koordinasi dengan BKP2 atau lintas SKPD lainnya.</li> </ul>
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kabupaten Sikka (BKP2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung Gernas kakao melalui penyediaan tenaga pelaksana penyuluh pertanian (PPL). PPL ini belum optimal tidak optimal, sebagian besar PPL adalah tenaga kontrak</li> <li>Melakukan pendidikan, pelatihan dan pembinaan kepada para petani.</li> <li>Dengan SC melakukan pendampingan &amp; diklat melalui SL (Sekolah Lapang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BKP2 berkoordinasi dengan Distanbun dalam melakukan pendampingan dan diklat kepada petani.</li> <li>Memperkuat koordinasi antara BKP2 &amp; Distanbun</li> <li>Memfungsikan kembali BKP2 sebagai Badan penyuluh yang bertugas membantu tugas Dinas teknis.</li> </ul>

<p>NGO/LSM :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swisscontact</li> <li>• WVI</li> <li>• Caritas</li> <li>• YPMF</li> <li>• Plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berperan dalam peningkatan produktivitas kakao, on farmoff farm</li> <li>• Peningkatan kapasitas petani melalui Sekolah Lapang (SL).</li> <li>• Peningkatan kualitas hidup petani, pendidikan dan kesehatan.</li> <li>• Mengupayakan pemasaran komoditi kakao.</li> <li>• Pembentukan petani modern.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelibatan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan programnya.</li> <li>• Koordinasi Program antar NGO dan Pemerintah Daerah.</li> </ul>
<p>Petani / Kelompok Tani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kegiatan budi daya dan pasca panen</li> <li>• Petani belum terlalu termotivasi untuk mengikuti kegiatan Diklat (belum maksimal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani tidak terus berharap pada program bantuan dari pemerintah/Pemda.</li> <li>• Kapasitas dan pengetahuan petani meningkat sehingga termotivasi untuk merawat kebunnya sendiri.</li> <li>• Petani termotivasi untuk melakukan pemasaran bersama.</li> </ul>
<p>Master training</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada petani terkait budidaya, produksi, pasca panen, dan pemasaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah jumlah master training guna mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan kepada petani.</li> <li>• Kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap petani diupayakan untuk lebih intensif dan berkelanjutan.</li> </ul>
<p>Petani andalan (Key farmers)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani terkait budidaya, produksi, pasca panen, dan pemasaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda perlu mengupayakan pelatihan yang lebih banyak lagi kepada petani andalan sehingga dapat membantu Pemda dalam peningkatan kapasitas petani dan pendampingan kepada petani.</li> <li>• Pembinaan dan pendampingan secara intensif oleh petani andalan guna peningkatan mutu kakao dan selalu memberikan motivasi kepada petani untuk selalu merawat kebunnya.</li> </ul>
<p>Local trader (Pedagang Desa, Kecamatan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini pedagang pengumpul langsung ke rumah-rumah petani untuk membeli biji kakao basah atau setengah kering dari para petani.</li> <li>• Pedagang pengumpul melakukan pengeringan biji kakao kembali, dan umumnya pengeringan biji kakao dilakukan selama selama sekitar 3-4 hari.</li> <li>• Pedagang pengumpul menjual kakao ke pengepul kecamatan atau ke pedagang Kabupaten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Local trader memberikan harga yang sesuai dengan harga pasar dan kualitas.</li> <li>• Local trader memberikan informasi harga pasar yang benar kepada petani.</li> <li>• Peningkatan kapasitas pengetahuan local trader akan kualitas kakao yang baik.</li> </ul>
<p>Pedagang Kabupaten (-/+ 20 pelaku)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima hasil kakao dari local trader,</li> <li>• Pedagang Kabupaten kadang memberikan bantuan modal kepada local trader untuk membeli kakao langsung dari petani.</li> <li>• Pedagang Kabupaten menjual kembali kakaonya ke pedagang besar di Makassar atau Surabaya (PT. Mars &amp; Comextra Majora).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan harga yang baik sesuai kualitas.</li> <li>• Peningkatan kapasitas pengetahuan local trader dan petani akan kualitas kakao yang baik.</li> <li>• Melakukan pembinaan kepada petani akan budi-daya tanaman dan pemasaran.</li> </ul>
<p>PT. Mars, Comextra Majora, PT. Bumi Tangerang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melatih MT dan melakukan pendampingan kepada MT dan KF pada saat implementasi SL, termasuk mentransfer pengetahuan tentang kualitas</li> <li>• Informasi harga dan Pembelian</li> <li>• Bekerjasama dengan lembaga sertifikasi melakukan sosialisasi “Cocoa Sustainability Cerification” kepada semua stakeholder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pelatihan secara intensif kepada para local trader terkait kualitas kakao yang sesuai standar kualitas yang dipersyaratkan oleh pasar.</li> </ul>
<p>Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kelompok Tani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menampung hasil kakao dari petani/anggota poktan dengan harga sesuai kualitas dan volume petani memiliki harga tawar yang lebih baik (tester 7 Rp 17-18rb).</li> <li>• Memberikan pendidikan kepada petani tentang kualitas kakao yang baik untuk dijual.</li> <li>• Melakukan fermentasi maupun pengeringan biji kakao kembali.</li> <li>• Menjual biji kakao kering kepada Comextra (minimal 1 ton).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan program pemasaran bersama</li> <li>• Mendorong petani untuk menjual kakaonya di UPH, misal dengan mengusahakan kembali dana buliran (kerjasama dengan lembaga keuangan/ pemda).</li> </ul>
<p>Toko Dirgahayu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supply alat-alat pertanian dan pupuk Lebih banyak untuk tanaman pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda diharapkan dapat mengupayakan beberapa toko lain sehingga dari sisi jarak dapat memudahkan petani dan dari sisi harga lebih bersaing.</li> <li>• Toko dirgahayu dapat berperan lebih jauh dalam menampung hasil-hasil pertanian dari petani sehingga dapat membantu petani dalam segi pemasaran.</li> </ul>
<p>Perusahaan Ekspedisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengiriman barang komoditi antar pulau (Makassar dan Surabaya).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berjalan sesuai mekanisme pasar.</li> </ul>

Tabel 4. Matriks Stakholder yang Belum Berperan Secara Optimal

Stakeholders yang Belum Berperan Secara Optimal		
STAKEHOLDERS	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
DPRD KAB. SIKKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terlalu berperan dalam membuat kerangka regulasi yang jelas terkait pengembangan kakao.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPRD bersama dengan Pemda melalui fungsi legislasi dapat ikut terlibat dalam pengembangan kakao melalui pembuatan kerangka regulasi yang dibutuhkan guna mendorong upaya.</li> </ul>
Litbang Universitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diupayakan kegiatan pembibitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perlunya melibatkan semua stakeholder terkait termasuk Pemda sekitar dalam menginisiasi kegiatan pembibitan yang cocok dengan kondisi alam sikka (NTT), misal melalui lomba kajian ilmiah sebagai langkah awal mengidentifikasi bibit yang cocok.</li> </ul>
Gereja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini belum begitu berperan dalam memberikan motivasi kepada petani khususnya kakao.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kegiatan gereja memberikan pemahaman kepada petani untuk mau merawat kebunnya.</li> <li>• Menumbuhkan kembali budaya berkelompok.</li> </ul>
Lembaga keuangan (Bank; Koperasi; dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koperasi dan lembaga keuangan lainnya saat ini belum memberikan bantuan pinjaman atau dana talangan kepada petani.</li> <li>• Skema simpan pinjam atau modal saat ini lebih kepada usaha jasa dan untuk kebutuhan konsumtif, belum ada untuk sector pertanian&amp;perkebunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerjasama dengan Pemda sebagai penjamin bagi petani yang mengajukan perkreditan. Hal tsb dapat mendorong pula petani untuk terlibat dalam pemasaran bersama.</li> </ul>
Media local baik radio maupun koran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada transfer informasi terkait pengembangan kakao yang diangkat oleh media.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan peran media untuk meningkatkan pengetahuan dan transfer teknologi petani baik dalam hal budi daya maupun pemasaran.</li> </ul>
Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa industri pengolahan (namun jumlahnya masih sedikit) bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan penyuluhan dan peningkatan kapasitas petani baik dalam budidaya maupun dalam pengolahan pasca panen, cth BT. Cocoa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya peningkatan kerjasama antara industri dan petani/kelompok petani secara langsung sehingga dapat memotivasi petani untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao sesuai permintaan perusahaan. melalui kerjasama ini dapat juga memperpendek mata rantai perdagangan sehingga harga yang diterima petani lebih baik.</li> <li>• Perlunya kerjasama antara perusahaan industri dengan pihak perbankan (lembaga keuangan) untuk mengatasi kendala permodalan yang sering dialami petani. dalam hal ini perusahaan industri dapat berperan sebagai avalis (bapak angkat) bagi petani.</li> </ul>

Dari analisis stakholder kakao di Sikka ada beberapa yang semestinya memiliki peran yang sangat penting. Namun sejauh ini peran mereka masih kurang. Berikut ini adalah stakeholder yang perannya masih kurang, dan kedepannya diharapkan lebih berperan lagi untuk dapat tercipta suatu perubahan menuju perbaikan iklim usaha rantai nilai kakao di Sikka.

## BAB V. PENUTUP

Langkah operasional kebijakan yang perlu diwujudkan dalam pengembangan agribisnis kakao di Kab. Sikka adalah melalui perencanaan, implementasi, dan pengawasan partisipatif (participatory) yang bahu membahu (integrative),

---

menyeluruh (holistic), dan kontinyu (sustainable) dengan landasan nota kesepakatan bersama (memorandum of understanding) antar berbagai pihak (stakeholders).

### **Usulan Intervensi**

Untuk mengatasi permasalahan yang melingkupi rantai nilai usaha kakao di Sikka demi meningkatkan iklim usaha kakao di Sikka, sejumlah rekomendasi usulan intervensi sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen dalam pengembangan usaha Kakao, melalui:
  - Peningkatan alokasi anggaran yang berasal dari APBD dalam rangka pengembangan usaha kakao.
  - Menyediakan kerangka regulasi pengembangan sektor kakao secara terpadu, sesuai kebutuhan masing-masing aspek rantai nilai (Aspek Ketersediaan Input; Produksi; Tata Niaga/Pemasaran, dll). Peran pemda dalam memfasilitasi dan menentukan harga pasar, sehingga daya tawar petani lebih baik.
  - Perencanaan dan pengembangan usaha kakao secara berkelanjutan dan lebih fokus pada peningkatan kapasitas petani, tidak hanya program yang bersifat fisik.
2. Memperkuat koordinasi lintas stakeholders dan SKPD (Disbuntan&BKP2, dan lainnya) serta koordinasi Program antar NGO dan Pemerintah Daerah, pelibatan lebih aktif dari lembaga perbankan dalam memberikan bantuan permodalan kepada petani kakao. Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas stakholdes dilakukan melalui Revitalisasi Dewan Kerjasama Ekonomi Daerah (DKED) melalui perubahan dasar hukum pembentukannya. Revitalisasi DKED dapat dilakukan dengan membuat Perda/Perbub yang didalamnya antara lain untuk: Memperjelas, mempertegas, dan memperluas cakupan/fungsi, struktur, kewenangan DKED.
3. Memutus ketergantungan petani terhadap pedagang pengumpul melalui penguatan kapasitas petani dan kelompok tani untuk pemasaran bersama, serta penguatan UPH sebagai penampung hasil petani.
4. Penguatan kapasitas petani dan kelembagaan petani dapat dilakukan melalui beberapa program seperti:
  - Pelatihan petani untuk bertani kakao secara baik (GAP); antara lain melalui menyediakan anggaran untuk pelatihan dan studi banding;
  - Memperkuat kelembagaan petani dari sisi kemampuan maupun kekuatan legalitasnya (badan hukum);
  - Memperkuat dan mempertajam proram pemberdayaan petani dan kelompok tani; dan sebagainya.
  - Mengembangkan alternatif jaringan pengaman ekonomi selain dari usaha perdagangan kakao.
5. Penguatan kapasitas dan jumlah PPL sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan rendahnya produktivitas kakao di Sikka. Beberapa kegiatan atau program yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas dan jumlah PPL, diantaranya seperti:
  - Penguatan kapasitas optimalisasi PPL yang ada secara fungsional di semua tingkatan pemerintahan;
  - Penguatan dan restrukturisasi kelembagaan Distanbun; dan sebagainya.
  - Meningkatkan koordinasi Distanbun dengan BKP2;
  - Training of Trainer (TOT) dan sekolah lapang bagi PPL dan penambahan jumlah PPL minimal 1 orang satu desa;
  - Optimalisasi peran penyuluh swadaya di masing-masing desa;

Dari alternatif intervensi diatas, dapat dilakukan dari melalui suatu peraturan, yaitu:

1. Meningkatkan anggaran belanja pemerintah untuk pembiayaan aspek legal, pembinaan petani, kelompok tani, petugas penyuluh (sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, dan sebagainya), dan pengembangan usaha pembiayaan mikro di tingkat petani.
2. Pengalokasian anggaran oleh Pemda atau instansi terkait serta memfasilitasi agar petani kakao lebih mudah memperoleh pinjaman dari lembaga pembiayaan.

3. Kebijakan lain, baik dalam bentuk Perda/Perbub, maupun berupa program disusun berdasarkan pada dua alternatif tindakan yang digabung sebagai berikut: Pemerintah menetapkan mekanisme proses pembinaan kepada petani kakao, kelompok tani melalui penyediaan informasi, pengembangan usaha (manajemen, pemasaran dan teknologi), pelatihan dan subsidi. Selain itu program peningkatan kapasitas dan jumlah PPL juga harus dilakukan. Aturan main tersebut kemudian dijadikan dasar aturan main masing-masing stakeholder yang terlibat dan tergabung dalam DKED.



# LAPORAN PENELITIAN

---

## Evaluasi Gerakan Nasional Peningkatan dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO)

**KERJASAMA ANTARA:**

FORD FOUNDATION

dengan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

**Jakarta 2013**

# DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
I. Latar Belakang GERNAS Kakao .....	1
II. Pelaksanaan Program GERNAS Kakao Secara Nasional .....	2
2.1 Struktur Kelembagaan.....	2
2.2 Sasaran Program GERNAS.....	3
2.3 Evaluasi Pelaksanaan GERNAS Secara Nasional.....	3
III. Pelaksanaan GERNAS di Sikka.....	3
IV. Capaian Program GERNAS Kakao di Sikka.....	7
V. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan .....	15

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Program GERNAS 2009-2011.....	3
Tabel 2.	Potensi Produktivitas Pelaksanaan GERNAS Kakao Tahun Periode 2009-2012.....	3
Tabel 3.	Data Sebarab GERNAS Kakao di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009-2012.....	7
Tabel 4.	Capaian Kegiatan Peremajaan.....	8
Tabel 5.	Form Monitoring Keragaman Tanaman GERNAS Kakao Kegiatan Peremajaan dengan Bibit Somatic Embriogenesis (SE) Tahun 2009.....	8
Tabel 6.	Capaian Kegiatan Rehabilitasi di Sikka.....	10
Tabel 7.	Form Monitoring Keragaman Tanaman Gernas Kakao Kegiatan Rehabilitasi dengan Teknik Sambung Samping tahun 2009.....	10
Tabel 8.	Capaian Kegiatan Rehabilitasi di Sikka.....	12
Tabel 9.	Form Monitoring Keragaman Tanaman GERNAS Kakap Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao Tahun 2009.....	12

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur GERNAS Kakao.....	2
-----------	----------------------------	---

## I. LATAR BELAKANG

Kakao merupakan komoditas strategis Indonesia yang menjadi salah satu sumber devisa Negara. Pada tahun 2009, ekspor Biji kakao Indonesia menyumbangkan nilai ekspor ketiga terbesar setelah kelapa sawit, dan karet (FAO, 2010). Nilai produktivitas kakao mencapai 844.626 ton (tahun 2010), menempatkan Indonesia menjadi Negara penghasil kakao terbesar kedua setelah Pantai Gading sebesar 1.242.290 ton (FAO, 2010). Luas lahan perkebunan kakao terus bertambah setiap tahunnya (rata-rata 7,9% per tahun), namun hal tersebut tidak lantas makin meningkatkan produktivitas kakao, justru saat ini jumlah produksinya semakin menurun. Data dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan, bahwa selama 4 tahun terakhir produksi kakao mengalami penurunan yang cukup drastis dari 1.100/kg/ha/th menjadi 660/kg/ha/th yakni sekitar 40%.

Penurunan produktivitas tersebut diantaranya disebabkan lambatnya peremajaan (umur tanaman tua), kurangnya perawatan terhadap tanaman kakao yang ada, dan gangguan hama Penggerek Buah Kakao (PBK) dan penyakit *Vascular Streak Dieback* (VSD) sehingga menyebabkan turunnya mutu biji kakao yang dihasilkan. Penurunan produktivitas kakao tersebut berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat terutama di daerah sentra penghasil kakao. Sektor kakao merupakan cerminan ekonomi kerakyatan, dimana kakao menjadi sumber penghidupan bagi hampir 1,5 juta rumah tangga. Dari luas total lahan pengembangan yang mencapai 1,6 juta ha, sekitar 96% pelaku budi daya kakao dilakukan oleh perkebunan rakyat, dengan kepemilikan lahan sekitar 0,25 ha. Disamping menurunnya kesejahteraan petani, penurunan produktivitas kakao ini juga berdampak pada menurunnya produktivitas kakao secara nasional. Tidak hanya semakin menjauhkan cita-cita Indonesia sebagai Negara penghasil kakao terbesar di dunia, bahkan Indonesia menjadi Negara pengimpor terbesar.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah melakukan langkah perbaikan melalui program Gerakan Nasional (Gernas) kakao yang

diimplementasikan sejak 2009. Gernas kakao merupakan gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional untuk percepatan peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan memberdayakan/melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada.

Program Gernas berawal dari inisiatif 4 gubernur yang berada di Sulawesi (Sulsel, Sulut, Sulbar, dan Sultra) sebagai daerah sentra komoditi kakao terbesar di Indonesia (menyumbang 60% kakao nasional). Pada Agustus 2008, Usulan tersebut kemudian disambut baik oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat itu, yang kemudian menetapkan program Gerakan Nasional (Gernas) guna peningkatan produksi dan mutu kakao yang implementasinya dilaksanakan pada tahun 2009. Daerah sasaran Gernas ini pada awal penyelenggaraan (2009) terdiri dari 40 Kabupaten di 9 Provinsi, dikarenakan manfaatnya sangat besar, jangkauannya semakin meluas setiap tahunnya hingga mencapai 98 Kabupaten di 25 Propinsi (2011), namun kemudian cakupannya kembali menurun menjadi 12 Provinsi pada tahun 2012 dan 4 provinsi di 2013 disesuaikan dengan target cakupan wilayah gernas yang meliputi 450 ribu ha.

Dari 5 (lima) daerah sasaran Gernas kakao, Provinsi NTT menjadi salah satu daerah pelaksanaan program Gernas dengan lokasi kegiatan berada di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende. Dengan luas areal perkebunan mencapai 46.465 ha dan produksi per tahun mencapai 12.278 ton, menempatkan provinsi NTT pada urutan ke 5 setelah Sulawesi, Sumatera, Maluku dan Jawa (BPS, 2011). Di Provinsi NTT, Kakao merupakan komoditas yang memberi sumbangan tertinggi di bidang perkebunan setelah kelapa, ubi, jagung, dan kopi. Sistem budi daya kakao yang masih bersifat tradisional dan keengganan serta minimnya pengetahuan yang dimiliki petani menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan mutu kakao di NTT. Produktivitas kakao di Provinsi NTT masih rendah (264, 2 kg/ha/tahun), jauh dibawah rata-rata nasional (900 kg/ha/tahun). Jika dikelola dengan baik, provinsi NTT berpotensi

menjadi penghasil kakao terbesar. Luas arealnya masih sangat luas yakni mencapai 385.711 ha (masih terdapat perluasan areal sebesar 89%).

Pengembangan budidaya kakao di provinsi NTT tersebar di seluruh wilayah kecuali Kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang dengan produksi tertinggi di Kabupaten Sikka (10.325, 20 ton). Luas areal kakao di Sikka mencapai 21.568 ha dengan total produksi 7158 ton (Distanbun Provinsi NTT, 2011). Luas areal potensi pengembangan kakao di Sikka merupakan yang terluas di NTT (disusul Kab. Ende dan Flores Timur), namun kondisinya yang memprihatinkan menjadi salah satu alasan Pemerintah menjadikan Sikka sebagai daerah sasaran Gernas kakao.

Guna mengukur keberhasilan suatu program dalam pencapaian realisasi target dan mengupayakan usulan program perbaikan ke depannya, maka dilakukan suatu evaluasi atas program. Evaluasi

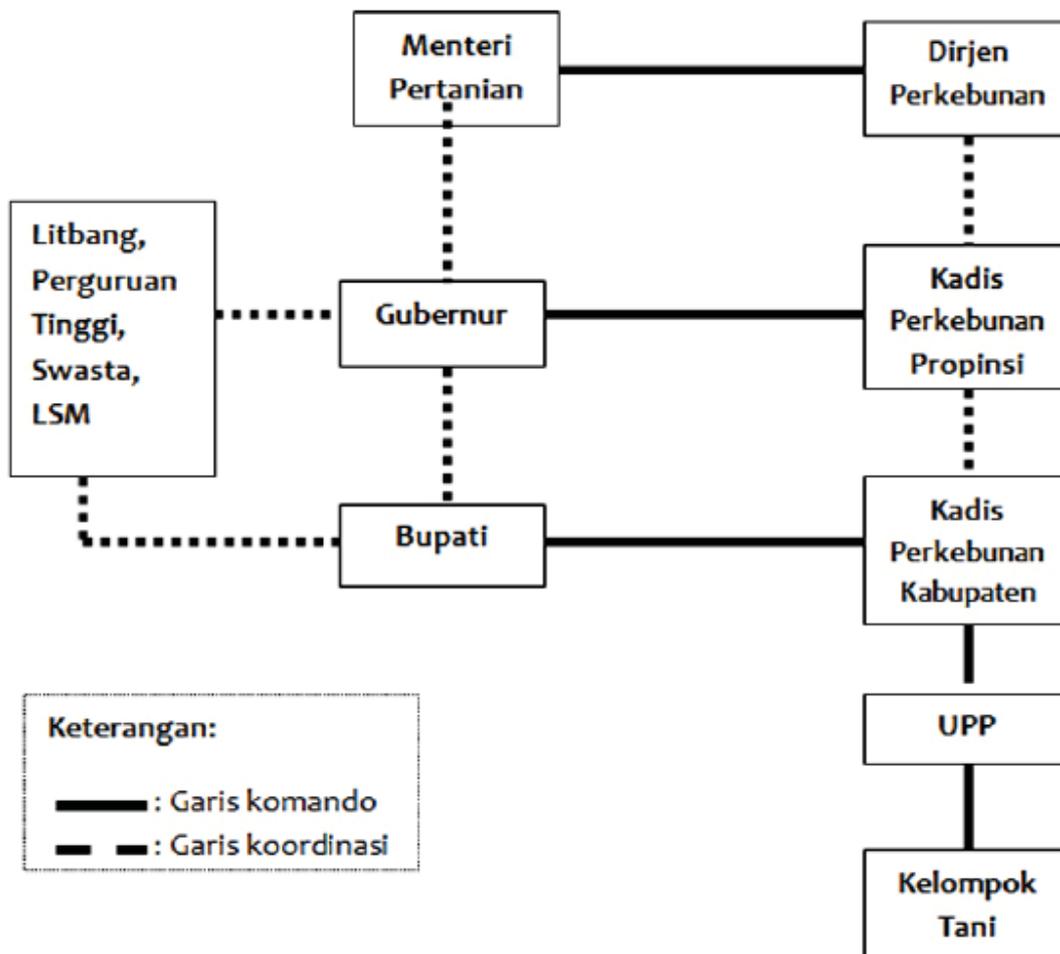
tersebut mencakup evaluasi capaian kinerja program, realisasi, dampak dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan gernas dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan petani kakao.

## II. PELAKSANAAN PROGRAM GERNAS KAKAO SECARA NASIONAL

### 2.1 Struktur Kelembagaan

*Gernas merupakan program bersama yang melibatkan berbagai stakeholder terkait, baik dari unsur Pemerintah, maupun non pemerintah.* Pihak yang terlibat tersebut diantaranya Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota setempat, swasta, perbankan dan juga termasuk petani. Guna mendukung pencapaian program ini, masing-masing pihak diharapkan mampu memberikan kontribusi/dukungan untuk kegiatan Gernas kakao. Berikut adalah struktur pelaksana Gernas kakao.

**Gambar1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao**  
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1643/Kpts/OT.160/12/2008



## 2.2 Sasaran Program Gernas

*Program gernas kakao ditujukan untuk meningkatkan produksi dan mutu kakao yang dihasilkan. Melalui peningkatan produktivitas dan kualitas biji kakao diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani kakao.* Sasaran gernas ini meliputi program berikut:

1. Perbaikan pertanaman kakao rakyat seluas 450.000 ha, terdiri dari:
  - Peremajaan tanaman seluas 70.000 ha;
  - Rehabilitasi tanaman seluas 235.000 ha;
  - Intensifikasi tanaman seluas 145.000 ha.
2. Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pendampingan kepada 450.000 petani
3. Pengendalian hama dan penyakit tanaman seluas 450.000 ha.
4. Perbaikan mutu kakao sesuai SNI.

**Tabel 1. Sasaran program gernas 2009-2011**

Tahun	Program	Target (ha)	Realisasi (ha)	Keterangan
2009	1. Peremajaan	20.000	20.000	40 kabupaten, 9 propinsi
	2. Rehabilitasi	60.000	59.600	
	3. Intensifikasi	65.000	65.000	
2010	1. Peremajaan	15.150	14.850	56 kabupaten, 13 propinsi
	2. Rehabilitasi	28.613	28.394	
	Intensifikasi	15.900	15.900	
2011	1. Peremajaan	49.500	40.000	98 kabupaten, 25 propinsi
	2. Rehabilitasi	74.200	69.050	
	3. Intensifikasi	62.800	43.200	

Sumber: Ditjenbun, 2012.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sesungguhnya target capaian gernas yang mencakup 450 ribu ha sudah hampir selesai. Sisanya sekitar 128.160 ha telah diselesaikan pada tahun 2012-2013 yang meliputi 5 (lima) Provinsi penghasil kakao terbesar yaitu Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra dan NTT. Meskipun secara garis besar, target gernas kakao telah terealisasi, namun mengingat luasnya areal lahan kakao yang mencapai 1,6 juta ha, program Gernas ini hanya mencakup 30% dari total luas lahan kakao di Indonesia.

## 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Gernas Secara Nasional

*Program Gernas mampu menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan mutu kakao di Indonesia.* Data dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan adanya peningkatan produktivitas tanaman kakao khususnya pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi melalui program

sambung samping maupun sambung pucuk. Hasil dari dua kegiatan tersebut dapat terlihat dalam kurun waktu 1,5 tahun, lebih cepat dibandingkan dengan melakukan penanaman bibit (peremajaan) yang hasilnya baru terlihat setelah 3 tahun. Berikut data peningkatan potensi produktivitas kakao dari hasil evaluasi pelaksanaan Gernas kakao 2009-2012 yang dilakukan oleh tim Independen (Kerjasama Ditejenbun, Bappenas, dan Kemenkeu).

**Tabel 2. Potensi Produktivitas Pelaksanaan Gernas Kakao Tahun Periode 2009-2012**

*Meskipun pelaksanaan Gernas hanya mencakup 30%*

No.	Kegiatan	Produktivitas Awal (Kg/ha)	Potensi Produktivitas (Kg/ha)	
			Nilai	%
1.	Peremajaan	442	1.100	249
2.	Rehabilitasi	567	1.600	282
3.	Intensifikasi	1.089	1.100	101

Sumber: Ditjenbun, Kementan 2011.

*dari total luas kebun kakao di Indonesia, namun mampu meningkatkan produktivitas.* Berdasarkan data di atas, ditambah hasil wawancara yang dilakukan dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), menunjukkan bahwa pelaksanaan Gernas telah mampu meningkatkan produktivitas kakao hingga mencapai lebih dari 200%. Padahal program Gernas yang dilaksanakan baru mencakup 30% dari keseluruhan kebun yang ada di Indonesia. Hal ini berarti bahwa jika program gernas ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan maka besar kemungkinan Indonesia dapat mengalahkan Pantai Gading dan Ghana sebagai produsen kakao terbesar di dunia. Selaras dengan pendapat Pihak Pemerintah, pelaku usaha kakao sendiri mengakui bahwa dengan adanya program Gernas kakao dapat menjaga ketersediaan bahan baku dalam negeri. Meskipun luas areal cakupan Gernas baru mencapai 30% dari luas total areal perkebunan kakao (1,6 jt ha) di Indonesia, program Gernas cukup membantu menjaga produksi kakao dalam negeri sehingga di tahun 2012 tidak terjadi penurunan secara signifikan.

*Namun masih kecilnya jangkauan sasaran Gernas menimbulkan sedikit kekhawatiran pengusaha akan ketersediaan bahan baku kakao di masa mendatang.* Sebagaimana diketahui, disamping program gernas, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan **tarif Bea Keluar (BK)** bagi pengusaha yang menjual kakao dalam bentuk biji tanpa ada *value added*. Di satu sisi, penerapan kebijakan tersebut memberikan dampak positif dengan meningkatnya industri pengolahan

kakao dalam negeri, namun di sisi lain peningkatan pertumbuhan industri pengolahan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas bahan baku biji kakao sehingga muncul kekhawatiran dari pengusaha akan hilangnya bahan baku di pasaran.

*Keberlanjutan program Gernas menjadi harapan bagi Pemda maupun pengusaha.* Pihak Kementan melalui Sekretaris Gernas, Heri Mardianto, telah menjelaskan bahwa program Gernas akan berakhir pada tahun 2013. Didasarkan pertimbangan banyaknya komoditi unggulan lain yang juga memerlukan penanganan secara intensif, maka Kementerian Pertanian dan Presiden menandatangani **Pakta Integritas** berisi komitmen bersama untuk melaksanakan program swasembada gula. Adanya rencana pemerintah untuk mengganti program Gernas dengan program swasembada gula pada tahun 2013 memberikan kekhawatiran pada pemda dan pelaku usaha akan pengembangan kakao selanjutnya. Bagi Pemda, meskipun program Gernashanya merupakan program stimulan, namun Pemda berharap pendampingan dari pemerintah dapat berjangka panjang hingga daerah mampu secara mandiri mengembangkan sektor komoditi unggulan di daerah. Sedangkan bagi pelaku usaha, adanya program Gernas dalam meningkatkan produktivitas dan mutu kakao mampu menjamin keamanan pasokan bahan baku kakao, sehingga industri pengolahan dalam negeri dapat semakin berkembang.

*Meskipun program Gernas telah berakhir, namun program pengembangan kakao tetap ada dengan lingkup kegiatan lebih kecil.* Pengalihan dana APBN dari kakao ke gula tidak berarti menghilangkan sama sekali program pengembangan kakao. Melalui program Gernas, pada tahun-tahun pertama pelaksanaan telah diupayakan kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi sehingga pada tahun selanjutnya yang lebih dibutuhkan adalah program yang bersifat peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani. Dijelaskan oleh Sekretaris Gernas Ditjenbun, Heri Moerdianto, program pengembangan kakao ke depan akan lebih diarahkan pada peningkatan pemberdayaan petani kakao menuju petani kakao yang berswadaya dan mengurangi bantuan sarana produksi seperti pupuk dan peralatan.

*Pemda dan stakeholders di daerah diharapkan melanjutkan program Gernas Kakao.* Gernas hanya merupakan program stimulan untuk memberikan pemahaman kepada daerah pentingnya pengembangan sektor unggulan bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah sehingga dengan berakhirnya Gernas kakao ini diharapkan juga akan ada keberlanjutan program serupa yang dilaksanakan oleh Pemda. Dalam melaksanakan program pengembangan kakao di daerah, diharapkan Pemda melakukan kemitraan yang dilakukan baik antara Pemda dengan pengusaha atau pengusaha dengan

stakeholder terkait lainnya (lembaga perbankan, LSM, dan lembaga lainnya) dalam upaya peningkatan produktivitas dan mutu kakao di Indonesia.

### III. PELAKSANAAN GERNAS KAKAO DI SIKKA

*Kabupaten Sikka memiliki luas areal perkebunan kakao yang terluas di NTT, namun produktivitas kakao di Sikka masih dibawah rata-rata nasional.* Luas areal perkebunan kakao di NTT mencapai 46.245 ha, sekitar 48% luas lahan tersebut berada di Sikka. Dengan kepemilikan kebun petani kakao rata-rata 0,25 ha, petani Sikka menyumbang sekitar 55,1% kakao di NTT yakni sebesar 321/kg/ha/tahun. Jika dibandingkan dengan produktivitas kakao secara nasional yang mencapai 900 kg/ha/tahun, produktivitas kakao di Sikka masih tergolong sangat rendah. Rendahnya produksi dan mutu kakao tersebut disebabkan beberapa hal, yakni banyaknya umur pohon yang sudah tua (30-40 tahun), rendahnya pengetahuan petani untuk merawat kebun kakao, adanya serangan hama penyakit dan rendahnya penanganan pasca panen.

Dengan berbagai permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas tanaman kakao tersebut, Pemerintah menetapkan Kabupaten Sikka sebagai salah satu daerah pelaksanaan program Gernas kakao. Guna mengoptimalkan pencapaian program Gernas, maka peran dan pelibatan semua stakeholder merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan Gernas. Berikut peran dan keterlibatan dari masing-masing aktor pelaksana program Gernas.

#### a) Lembaga Pemerintah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah)

Penanggungjawab pelaksanaan Gernas kakao di Kabupaten Sikka adalah Dinas Pertanian dan Perbunan yang berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan tingkat Provinsi serta Pemerintah melalui Dirjen Pertanian dan Perkebunan. Tugas yang menjadi wewenang Pemda Kab. Sikka telah tercantum secara jelas dalam Pedoman Umum Teknis (Pedum Teknis) Pelaksanaan Gernas, dimana Pemda Sikka menyediakan anggaran APBD untuk mendukung pelaksanaan Gernas meliputi:

1. Menyediakan pembiayaan dan melakukan penetapan calon petani/calon lahan (CP/CL);
2. Menyediakan pembiayaan dan melakukan sebagian kegiatan pemberdayaan/pelatihan petani dan sosialisasi penerapan SNI;
3. Menyediakan penyuluh lapangan termasuk pembiayaannya;

4. Menyediakan pembiayaan untuk sarana pendukung operasional program termasuk melaksanakan pengadaan bahan dan alat untuk kegiatan peremajaan.
5. Menyediakan pembiayaan untuk pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi termasuk kegiatan sosialisasi kegiatan.

Dalam hal menyediakan sumber daya manusia pelaksana, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

*Pertama, tenaga pendamping terbatas baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.* Dalam pedum teknis gernas, merupakan wewenang Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyediakan tenaga pendamping. Pemda Provinsi dan Kab. Sikka dalam hal ini merekrut 185 tenaga pendamping baru yang terdiri dari 48 orang lulusan S1 sebagai tenaga kontrak dan 137 orang lulusan SLTA sebagai petugas lapang pembantu tenaga kontrak pendamping (PLP-TKP). Tenaga pendamping tersebut merupakan tenaga pendamping baru yang bukan berasal dari (Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan (BKP2) dan umumnya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga sebelum pelaksanaan program, PLP-TKP tersebut mendapatkan pelatihan yang dilaksanakan secara terpusat di Puslitkoka Jember. Meskipun telah dilaksanakan pelatihan, namun waktu pelatihan yang singkat dan tenaga pendamping yang umumnya berasal dari latar belakang beragam tidak memiliki kemampuan teknis yang mencukupi untuk mentransfer pengetahuannya kepada petani, contohnya tenaga pendamping kurang mampu melakukan pendekatan kepada petani untuk mengikuti pelatihan, pendamping melakukan sendiri kegiatan rehabilitasi tanpa melibatkan petani, disamping itu minimnya pengetahuan tenaga pendamping juga mengakibatkan gagalnya teknik sambung samping dan sambung pucuk yang dilakukan di Sikka.

*Kedua, tenaga pendamping (PLP-TKP) direkrut baru dan bukan berasal dari tenaga pendamping yang sudah terlatih.* Pemda sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk merekrut tenaga pendamping (PLP-TKP) memilih tenaga-tenaga kerja baru melalui mekanisme perekrutan. Pada

kenyataannya di lapangan, PLP-TKP yang dipilih tersebut tidak memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan teknis akan tugas dan tanggungjawab sebagai PLP-TKP. Kendalanya ketika di lapangan, disamping memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan teknis, PLP-TKP relatif kesulitan melakukan pendekatan kepada petani untuk melakukan pembudidayaan maupun perawatan pasca panen. Seharusnya, dalam memilih PLP-TKP, Pemda menggunakan tenaga pendamping yang benar-benar terlatih dan telah memiliki keahlian teknis yang baik sehingga upaya pemberdayaan kepada petani dapat dilakukan secara optimal.

*Ketiga, Keberadaan BKP2 belum dioptimalkan sebagai tenaga pendamping.* BKP2 sebagai badan penyuluh pertanian pangan secara kelembagaan dan kemampuan teknis lebih sesuai untuk melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada petani, namun pelibatannya dalam program Gernas belum dioptimalkan. Tenaga penyuluh yang dimiliki BKP2 secara psikologis telah mengenal para petani dan lebih dekat dengan petani sehingga pendekatan yang dilakukan akan lebih diterima oleh petani. Guna mendukung ketepatan sasaran program dan tercapainya tujuan yang ditargetkan, Pemda Sikka seharusnya dapat meningkatkan koordinasi dengan BKP2 sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan kepada petani. Minimnya koordinasi antar pihak terkait dan ketiadaan regulasi yang mengatur sinkronisasi dan sinergi program antar SKPD khususnya Distanbun dan BKP2 terkait tenaga pendamping menyebabkan program pemberdayaan petani tidak optimal dalam pelaksanaannya.

#### **b) Lembaga Keuangan**

*Pembiayaan program Gernas selama 4 tahun dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, kredit perbankan, swasta dan petani.* Pembiayaan yang berasal dari perbankan ditujukan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan tanaman pada tahun ke 2 dan seterusnya melalui program revitalisasi perkebunan. Sebagaimana diatur dalam Permentan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dan

Permenkeu No. 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP). Meskipun pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran APBN/APBD dan bantuan kredit untuk petani, dalam pelaksanaannya program gernas masih terkendala dalam hal pendanaan, berikut beberapa kendala terkait pembiayaan dan pemanfaatan skema bantuan kredit yang diberikan dalam program Gernas.

*Pertama, Keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam program Gernas.* Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 1 triliun setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Alokasi anggaran Gernas di Kab. Sikka sendiri mencapai 2 Milyar untuk keseluruhan penyelenggaraan kegiatan program Gernas. Dana tersebut dikelola langsung oleh Dirjen Pertanian dan Perkebunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Distanbun menyatakan bahwa Peran Pemda hanya pada alokasi dana sharing sebesar 10% dari keseluruhan dana (sekitar 80 juta) guna membiayai kegiatan operasional pekerjaan lapangan sedangkan untuk penyediaan bibit dan semua peralatan didatangkan dari luar daerah Kab. Sikka sehingga sebagian besar (hampir semua) dana yang dialokasikan tersebut kembali ke pusat sehingga praktis di daerah tidak mendapat manfaat apapun. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab belum optimalnya capaian program Gernas.

*Kedua, belum optimalnya pemanfaatan dana bantuan permodalan bagi petani.* Pemerintah menyediakan bantuan permodalan dengan bunga kredit rendah (6%) melalui skema bantuan dana revitalisasi perkebunan (kredit KPENRP). Dengan kredit tersebut, pemerintah mensubsidi kelebihan bunga petani (10%) dengan harapan petani dapat lebih mudah mengakses permodalan untuk membiayai pemeliharaan kebun seperti membeli pupuk, pestisida, maupun alat pertanian. Namun dalam pelaksanaannya masih sedikit petani yang memanfaatkan dana tersebut. Beberapa kendala yang terjadi dalam pemanfaatan dana kredit tersebut diantaranya yaitu ketiadaan jaminan untuk mengajukan bantuan permodalan,

rendahnya peran pemda sebagai fasilitator antara petani dan pihak perbankan dan kurangnya sosialisasi kredit murah dari pihak perbankan. Kondisi tersebut diakui oleh Sekretaris Gernas, Heri Mardianto yang menyatakan bahwa rendahnya peran Pemda sebagai mediator bagi petani dengan pihak perbankan menjadi sebab tidak optimalnya penyerapan dana kredit KPENRP yang telah dicanangkan oleh Pemerintah (Kemenkeu).

Berdasarkan hasil FGD dengan stakeholder kakao di Sikka, adanya hambatan dalam akses permodalan diakui baik oleh Pemda maupun pihak perbankan sendiri. Pemda dalam hal ini kurang berperan dalam mensosialisasikan adanya program kredit murah bagi petani. Selain itu, kurangnya peran Pemda juga terlihat dari belum adanya upaya dari Pemda untuk memudahkan akses permodalan bagi petani untuk mendapatkan kredit. Ketiadaan program untuk mempertemukan petani dengan pihak perbankan maupun fasilitas sertifikasi lahan petani menjadi salah satu kelemahan lemahnya akses petani untuk mendapatkan permodalan. Pemerintah seharusnya dapat berperan sebagai bapak angkat yang berfungsi melindungi dan menjamin para petani yang umumnya tidak memiliki agunan ketika akan mengajukan kredit. Selain itu, untuk menumbuhkan kepercayaan pihak bank kepada petani, Pemda juga dapat memberikan kemudahan kepada petani melalui program sertifikasi lahan petani sehingga lahannya dapat digunakan sebagai agunan.

#### **c) Lembaga Non Pemerintah (LSM, swasta, gereja, dll)**

Dalam pelaksanaan program pengembangan kakao di Sikka termasuk dalam program Gernas, peran swasta terutama LSM terlibat lebih aktif. Di Sikka, terdapat cukup banyak (6 LSM yaitu *Swisscontact*, WVI, Caritas, YPMF, Plan dan Yayasan Karya Sosial-YKS) yang melakukan pendampingan khususnya dalam hal peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Sikka. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, LSM tersebut terlibat dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani dalam budi daya tanaman dan pengolahan pasca panen. Disamping

LSM, di Sikka gereja meskipun saat ini perannya masih kecil, ikut berperan dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sikka. Keterlibatan LSM dan lembaga lainnya dirasakan bermanfaat oleh petani di Sikka karena petani lebih dilibatkan langsung dalam setiap proses kegiatannya misal praktik sekolah lapang yang dilakukan oleh *Swisscontact* dan *WVI*.

#### IV. CAPAIAN PROGRAM GERNAS KAKAO di SIKKA

*Cakupan program Gernas kakao di Sikka baru mencapai 14% dari luas areal perkebunan yang ada.* Luas areal perkebunan kakao di Sikka sangat luas mencapai 21.568 ha, namun hingga tahun 2012 program Gernas hanya mampu mencapai sekitar 3.050 ha dan penambahan 200 ha lahan rehabilitasi di tahun 2013. Pelaksanaan program Gernas di Sikka tersebar di 13 (Tiga Belas) Kecamatan yaitu Kec. Talibura, Kec. Waigete, Kec. Bola, Kec. Doreng, Kec. Hewokloang, Kec. Kangae, Kec. Nelle, Kec. Koting, Kec. Koting, Kec. Nita, Kec. Lela, Kec. Mego, Kec. Paga, dan Kec. Tanawawo. Berikut sebaran daerah

pelaksanaan program Gernas di Kabupaten Sikka.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa konsentrasi terbesar kegiatan dilakukan pada tahun pertama yaitu mencapai 1,650 ha (2009), dengan cakupan kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi. Pada tahun pertama ruang lingkup kegiatan lebih banyak karena ditujukan untuk melakukan peremajaan pada tanaman yang rusak dan sudah tua sehingga pada tahun-tahun selanjutnya kegiatan lebih ditujukan pada kegiatan rehabilitasi tanaman. Pada tahun-tahun berikutnya, lingkup kegiatan lebih diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan intensifikasi sehingga luas lahan cakupannya pun semakin menurun. Ditunjukkan pada tabel diatas, luas lahan cakupan gernas lebih sedikit yakni hanya 400 ha pada 2010, 600 ha pada tahun 2011 dan 400 ha pada 2012 dan tersisa 200 ha pada tahun 2013. Melalui program Gernas kakao ini pemerintah memberikan program bantuan melalui 3 (Tiga) kegiatan utama yakni peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi serta dilakukan program pemberdayaan petani untuk meningkatkan kapasitas petani baik dalam hal budi daya maupun pengolahan pasca panen termasuk upaya standarisasi produk kakao (SNI). Berikut akan diuraikan lebih mendalam

**Tabel 3. Data Sebaran Gernas Kakao di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009-2012**

NO.	KECAMATAN	TAHUN ANGGARAN										
		2009			2010		2011			2012		2013
		P	R	I	P	I	P	R	I	R	I	R
1.	Talibura			175,3		11						
2.	Waigete				44,5		10					
3.	Bola		117,5		25							
4.	Doreng	100,5	44,5									
5.	Hewokloang	149,5	93	50	80,5							
6.	Kangae					30						
7.	Nelle								35			
8.	Koting		42			15			70			
9.	Nita		58,8	382				25	25		200	200
10.	Lela		44,5	200		30			20	25		
11.	Mego			92,8			150	15	130	50		
12.	Paga			100		124	15	60	20	125		
13.	Tanawawo					40	25					
	JUMLAH	250	400	1000	150	250	200	100	300	200	200	200
	JUMLAH TOTAL	3.250 Ha										

Keterangan: P= Peremajaan  
R= Rehabilitasi  
I= Intensifikasi

Sumber: Distanbun Sikka, 2013.

dampak dan manfaat yang didapat petani di Sikka dari pelaksanaan program Gernas.

### 1. Kegiatan Peremajaan

Peremajaan ditujukan untuk mengganti tanaman-tanaman yang sudah tua dan menanam kembali bibit baru yang lebih unggul (*Somatik Embriogenesis-SE*), atau tanaman baru yang didapat dari proses sambung samping atau sambung pucuk. Melalui peremajaan, tanaman kakao yang sudah berusia di atas 25 tahun dibongkar dan ditanami bibit *Somatic Embryogenesis* (SE). Bibit SE merupakan kloning dari bibit unggulan daerah yang kemudian direplikasi menjadi bibit unggul baru berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kakao (Puslitkoka) Jember, Jawa Timur. Keunggulan bibit SE ini antara lain produktivitas tinggi, umur panjang dan tahan terhadap hama dan penyakit utama sehingga diharapkan produk biji kakao dari benih SE ini akan meningkat dan lebih tahan terhadap hama dan penyakit.

Paket bantuan yang diberikan diantaranya berupa benih kakao SE, pestisida, pupuk, peralatan (handsprayer dan gunting galah), benih tanaman sela, dan upah kerja yang pelaksanaannya didasarkan pada Pedoman umum teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Selain itu kriteria kebun yang mendapatkan program peremajaan juga harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Ditjenbun Kementan dalam Pedum teknis 2009-2011. Berikut adalah kriteria kebun yang dijadikan lokasi kegiatan peremajaan:

**Tabel 4. Capaian Kegiatan Peremajaan**

Kabupaten	Tahun Anggaran				
	2009	2010	2011 (1,5T)	2012	Jumlah
Sikka	250	150	200	-	600
Ende	250	100	300	100	750
Flores Timur	-	150	300	-	450

- Umur tanaman yang sudah tua (umur >25 tahun);
- Jumlah tegakan/populasi tanaman <50% dari jumlah standar (1.000 pohon/hektar);
- Produktivitas tanaman rendah (<500 kg/ha/tahun);
- Terserang OPT utama (hama PBK dan *Helopeltis* spp. serta penyakit VSD dan Busuk Buah);
- Lahan memenuhi syarat kesesuaian, meliputi: curah hujan 1.500-2.500 mm (sangat sesuai) dan 1.250-1.500 atau 2.500-3.000 mm (sesuai), lereng 0-8% (sangat sesuai) dan 8-15% (sesuai).

Berdasarkan pada kriteria diatas, target dan realisasi program peremajaan yang dilakukan di Sikka mencapai 600 ha yang tersebar di 6 (Enam) Kecamatan yaitu Kec. Hewokloang, Kec. Doreng, Kec. Bola, Kec. Paga, dan Kec. Mego, Kec. Waigete. Berikut daerah yang menjadi lokasi kegiatan peremajaan di Sikka.

Berdasarkan data tabel 3 diatas, realisasi capaian kegiatan peremajaan di Sikka mencapai 100%. Dari sisi produktivitas (lihat tabel 4), kegiatan peremajaan juga telah menunjukkan adanya peningkatan produktivitas biji kakao, namun saying jumlahnya belum signifikan. Disamping waktu berbuah yang mencapai 4-5 tahun, adanya beberapa kendala baik dari sisi petani, teknis

**Tabel 5. Form Monitoring Keragaman Tanaman Gernas Kakao Kegiatan Peremajaan dengan bibit Somatic Embriogenesis (SE) Tahun 2009**

Kecamatan	Waktu Tanam (Bln/Thn)	Luas Tanam (Ha)	Tanaman Hidup (Ha)	Tanaman Mati (Ha)	Produktivitas 2011 Rata-rata (kg)	Produktivitas 2012 Rata-rata (kg)
Doreng	Des2009-Jan2010	100,50	83,49	17,01	25	175
Hewokloang	Des2009-Jan2010	149,50	133,40	16,10	35	225
<b>TOTAL/RATA-RATA</b>		<b>250,00</b>	<b>216,89</b>	<b>33,11</b>	<b>30,00</b>	<b>200,00</b>

Sumber: Distanbun, Sikka 2010.

pelaksanaan, maupun minimnya koordinasi yang dilakukan para pelaksana program menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan peremajaan.

Dari laporan pelaksanaan Gernas oleh Distanbun Sikka, diketahui penyebab tanaman mati ada dua, yakni:

1. Kelembaban tinggi karena tanaman tua/rusak belum ditebang
2. Kanker batang mati pucuk karena serangan hama penyakit (VSD)

Berikut beberapa kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan peremajaan.

*Rendahnya tingkat pengetahuan petani menjadi kendala dalam kegiatan peremajaan.* Tanaman kakao di Sikka mayoritas telah berumur tua (>25th) sehingga program peremajaan ini penting dilakukan guna meningkatkan produktivitas tanaman kakao. Sulitnya membujuk petani untuk menebang pohonnya merupakan salah satu hambatan program peremajaan ini. Kakao diakui petani sebagai sumber penghidupan, jika pohonnya ditebang, maka timbul kekhawatiran akan hilangnya pendapatan petani tersebut. Petani menghendaki untuk menebang pohonnya jika pemerintah mampu memberikan jaminan finansial sebagai kompensasi atas diputusnya pendapatan mereka dari hasil tanaman kakao. Selain kekhawatiran bahwa pendapatannya akan hilang, petani kakao di Sikka enggan untuk menebang tanamannya karena faktor psikologis dan kepercayaan bahwa tanamannya tidak boleh dipangkas, jika dipangkas maka tanamannya tidak akan berbuah lagi. Dari kendala psikologis petani tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan pengetahuan petani yang dilakukan embekalan lagi. Dari kendala psikologispetani tersebut dibutuhkan tenaga pendamping yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga meningkat pengetahuan petani akan budidaya tanaman dan tidak lagi merasa khawatir untuk menebang tanamannya.

*Faktor teknis menjadi kendala lain dalam pelaksanaan kegiatan peremajaan di Sikka.* Dalam pelaksanaan kegiatan peremajaan digunakan bibit SE yang dihasilkan melalui penelitian di Puslitkoka

Jember. Bibit SE yang digunakan belum pernah diujicobakan di lapangan dan ternyata tidak sesuai dengan kondisi geografis di Sikka sehingga hasilnya jauh dari target yang diharapkan. Keluhan juga datang dari para petani yang mengatakan bahwa bibit SE yang digunakan kualitasnya tidak lebih baik dari pohon sebelumnya. Kebun yang ditanami bibit SE lama berbuah. Keunggulan bibit SE ini masih perlu kajian lebih lanjut, dan disesuaikan dengan kondisi alam dan karakteristik lahan perkebunan di masing-masing. Disamping tanamannya lama tidak berbuah, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petani dan beberapa stakeholder terkait di Sikka, umumnya berpendapat bahwa mayoritas bibit SE yang digunakan terserang penyakit VSD yang cukup parah. Kondisi tersebut yang menyebabkan hasil dari kegiatan peremajaan di Sikka ini masih belum terlihat secara optimal.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Sekretaris Gernas, Heri Moerdianto yang menyatakan bahwa adanya kendala dalam penggunaan bibit SE tidak disebabkan oleh rendahnya mutu bibit SE, namun lebih dikarenakan pada teknis pemindahan bibit SE dari tempat pengembangan ke daerah lokasi tanam. Proses pengangkutan planlet yang kurang memenuhi standar, misal adanya pengunduran jadwal distribusi, proses pengepakan maupun sanitasi tempat pengangkutan tidak sesuai standar teknis yang ditetapkan sehingga mengakibatkan kualitas planlet menjadi menurun atau bahkan mati. Perlakuan yang tidak tepat pada benih SE disebabkan juga karena ketidaktahuan dari tenaga pendamping ataupun tenaga bantu yang melakukan pengangkutan benih SE tersebut dari tempat pembibitan di Puslitkoka ke daerah sebaran sehingga terkadang ada bibit (planlet) yang rusak ketika sampai di daerah tanam.

## 2. Kegiatan Rehabilitasi

*Rehabilitasi dilakukan terhadap tanaman yang masih berumur produktif namun produksinya menurun.* Kegiatan utama dalam kegiatan rehabilitasi ini dilakukan melalui sistem sambung samping dan sambung pucuk dengan menggunakan bahan tanam unggul yang diharapkan umur 9 bulan, tanaman kakao baru sudah dapat dipanen. Teknik sambung tersebut

menjadikan tanaman kakao lebih cepat dipanen dari pada penanaman tradisional yang harus menunggu 4-5 tahun.

Dalam Pedoman Teknis Daerah Gernas Kaka0 2009-2011 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, paket bantuan yang diberikan pada lingkup kegiatan rehabilitasi diantaranya adalah entres, pupuk majemuk non subsidi berupa briket (tablet) warna coklat muda sebanyak 200kg/ha dengan dosis spesifik lokasi 200 gr/pohon (diaplikasikan pada awal musim hujan), peralatan berupa handsprayer 1 (satu) buah tiap 5 ha, pestisida, berupa insektisida merek Matador 1 (satu) lt/ha, herbisida merek Toupan 1 lt/ha dan fungisida merek Amystartop 1 (satu) lt/ha, serta upah tenaga kerja. Sedangkan persyaratan kebun yang akan direhabilitasi adalah kebun hamparan dengan kondisi sebagai berikut:

- Umur tanaman masih produktif (umur <15 tahun) dan secara teknis dapat dilakukan sambung samping;
- Jumlah tegakan/populasi tanaman antara 70%-90% dari jumlah standar (1.000 pohon/hektar);
- Produktivitas tanaman rendah (<500 kg/hektar/tahun) tetapi masih mungkin untuk ditingkatkan;
- Jumlah pohon pelindung >70% dari standar;
- Terserang OPT utama (hama PBK, *Helopeltis* spp, dan Busuk Buah);

Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian, meliputi: curah hujan 1.500-2.500 mm (sangat sesuai) dan 1.250-1.500 atau 2.500-3.000 mm (sesuai); Lereng 0-8% (sangat sesuai) dan 8-15% (sesuai).

Berdasarkan kriteria kebun di atas, luasan kebun untuk program rehabilitasi di Sikka mencapai 700 ha yang tersebar di 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu Kec. Nita, Kec. Lela, Kec. Koting, Kec. Nelle, Kec. Talibura, Kec. Paga, Kec. Mego. Berikut capaian kegiatan rehabilitasi di Sikka hingga tahun anggaran 2012.

**Tabel 6. Capaian Kegiatan Rehabilitasi di Sikka**

Kabupaten	Tahun Anggaran				Jumlah
	2009	2010	2011 (1,5T)	2012	
Sikka	400	-	100	200	700
Ende	400	250	800	100	1,550
Flores Timur	-	-	100	-	100

Sumber: Dirjen Perkebunan, Kementan 2012.

Capaian pelaksanaan Gernas melalui kegiatan rehabilitasi dirasakan oleh petani lebih baik dibandingkan kegiatan peremajaan, disamping hasil panen lebih cepat, produktivitasnya juga lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat ditabel 6.

**Tabel 7. Form Monitoring Keragaman Tanaman Gernas Kakao Kegiatan rehabilitasi dengan teknik sambung samping Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Waktu Tanam (Bln/Thn)	Luas Tanam (Ha)	Tanaman Hidup (Ha)	Tanaman Mati (Ha)	Produktivitas 2011	Produktivitas 2012 rata-rata (kg)
1	Bola	Sept-Des 2009	117,50	71.595	45.905	rata-rata (kg)	875
2	Doreng	Sept-Des 2009	44,25	31.405	12.845	-	550,00
3	Hewokloang	Sept-Des 2009	93,00	63.625	29.375	360	900,00
4	Koting	Sept-Des 2009	42,00	27.125	14.875	-	520,00
5	Nita	Sept-Des 2009	58,75	37.942	20.808	-	830,00
6	Lela	Sept-Des 2009	44,50	28.740	15.760	-	525,00
	<b>TOTAL/RATA-RATA</b>		<b>400,00</b>	<b>260.432</b>	<b>139.568</b>	<b>360,00</b>	<b>700,00</b>

Sumber: Distanbun, Sikka 2010.

Penyebab Tanaman Mati:

- Kelembaban tinggi karena batang atas belum ditebang.
- Mati pucuk/tunas karena serangan hama penyakit (*helopeltis* dan VSD)

Beberapa kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi diantaranya adalah sebagai berikut.

*Minimnya pengetahuan tenaga pendamping dalam melaksanakan teknik sambung samping dan sambung pucuk menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi.* Meskipun telah dibekali pelatihan di Puslitkoka Jember, namun waktu pelatihan yang sangat singkat (sekitar 2 minggu) membuat tenaga pendamping tidak memiliki bekal yang cukup dalam melakukan pendampingan kepada petani. Tenaga pendamping umumnya memiliki latar belakang berbeda-beda sehingga tidak memiliki kemampuan teknis yang mencukupi. Akibatnya ketika dilapangan, tenaga pendamping tidak secara tepat mengidentifikasi jenis tanaman yang perlu direhabilitasi, bagaimana melakukan teknik penyambungan secara benar, maupun pemilihan tanaman yang baik dan tepat untuk dijadikan entres. Akibatnya terjadi kegagalan dalam melakukan sambung samping dan sambung pucuk. Melihat kondisi tersebut, seharusnya pendamping dibekali buku panduan teknis (SOP) mengenai tata cara melakukan teknik penyambungan dengan menyesuaikan dengan karakteristik lahan tanam sehingga dapat melakukan pendampingan secara tepat kepada petani.

*Dalam program rehabilitasi, transfer pengetahuan (transfer knowledge) yang harusnya merupakan hal yang utama dalam peningkatan kapasitas petani, justru belum dilaksanakan secara optimal.* Petani cenderung tidak dilibatkan dalam melakukan teknik penyambungan, tenaga pendamping (PPL) hanya menunjukkan bagaimana cara melakukan teknik penyambungan namun tidak melakukan praktik secara langsung sehingga petani tidak memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan teknik penyambungan. Kelemahannya, petani tidak mendapatkan penambahan informasi dan kapasitas petani dalam hal budi daya tidak meningkat. Hal tersebut akan berdampak pada tidak adanya keberlanjutan program, mengingat bahwa program Gernas hanya dilaksanakan hingga 2013.

## 1. Kegiatan Intensifikasi

*Intensifikasi dilakukan kepada lahan kakao yang umurnya masih produktif, dengan tingkat produksi potensial yang cukup tinggi, tetapi penerapan teknologi budidaya kakao yang masih terbatas.* Teknologi yang diupayakan dalam budidaya kakao adalah P3S yaitu pemangkasan, pemupukan, panen sering dan sanitasi. **Pemangkasan** ditujukan untuk memberi ruang penyiangan yang baik pada tanaman sehingga dapat merangsang pertumbuhan bunga (jika 30% penyiangan dimanfaatkan). Pemangkasan meliputi pemangkasan pemeliharaan, pemangkasan produksi, maupun kombinasi keduanya. Pemangkasan produksi umumnya dilakukan 1-2 kali setelah panen raya, sedangkan pemangkasan pemeliharaan umumnya dilakukan 1 kali sebulan atau tidak rutin tergantung kemauan petani. Pemangkasan pemeliharaan dapat dilakukan melalui membuang cabang-cabang liar atau tunas-tunas air. **Pemupukan** ditujukan untuk memberikan ketersediaan zat hara bagi tanaman sehingga tanah menjadi lebih subur. **Panen sering** ditujukan untuk mencegah berkembangnya hama dan penyakit dengan memanen buah kakao ketika sudah mencapai tingkat kematangan. **Sanitasi** dimaksudkan untuk menjaga lingkungan kebun yang bersih, sehingga mencegah berkembangnya hama penyakit.

Berdasarkan Pedoman Teknis Daerah Gernas Kakao 2009-2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Persyaratan, bantuan peralatan yang diberikan dalam lingkup kegiatan intensifikasi berupa pupuk, pestisida, handsprayer, gunting galah dan upah tenaga kerja. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi kebun kakao untuk mengikuti kegiatan intensifikasi Gernas Kakao, antara lain:

- a) Tanaman masih muda (< 10 tahun) tetapi kurang terpelihara;
- b) Jumlah regakan/ populasi tanaman >70% dari jumlah standar (1.000 pohon/hektar);
- c) Produktivitas tanaman rendah (<500 kg/ha/tahun) dan masih mungkin untuk ditingkatkan;

- d) Pohon pelindung >20% dari standar;
- e) Terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Utama (PBK, *Helopeltis* spp., penyakit VSD dan Busuk Buah).
- f) Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian, meliputi: curah hujan 1.500 -2.500 mm (sangat sesuai) dan 1.250 -1.500 mm atau 2.500-3.000 (sesuai); Lereng 0-8% (sangat sesuai) dan 8-15% (sesuai).

Berdasarkan kriteria kebun yang telah ditetapkan di atas, lokasi kebun Sikka untuk program intensifikasi tersebar di 6 (Enam) Kecamatan dengan lokasi yang berganti setiap tahunnya dengan mayoritas bantuan tersebar di Kec. Nita, Kec. Lela, dan Kec. Koting. Berikut capaian kegiatan intensifikasi di Kab. Sikka.

**Tabel 8. Capaian Kegiatan Rehabilitasi di Sikka**

Kabupaten	Tahun Anggaran					Jumlah
	2009	2010	2011 (1,5T)	2012	2013	
Sikka	1.000	250	300	200	200	1.950
Ende	1.000	200	650	100	-	1.950
Flores Timur	-	150	850	-	-	1.000

Sumber: Dirjen Perkebunan, Kementan 2013.

*Kegiatan intensifikasi ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman kepada petani akan pentingnya pemeliharaan kebun kakao.* Karakter petani di Sikka sendiri umumnya tidak melakukan perawatan secara intensif tapi justru terkesan membiarkan dan hanya menengok kebunnya ketika tiba waktu panen. Keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga serta keterampilan yang kurang memadai menjadi alasan petani enggan melakukan pemeliharaan pada kebun kakao. Adanya program Gernas dapat menjadi penggerak bagi petani untuk mulai melakukan perawatan dan pemupukan pada kebun kakaonya hal ini ditunjukkan oleh tabel 8 dibawah ini.

*Bantuan pengadaan pupuk dalam program Gernas berupa pupuk majemuk formula khusus disediakan oleh Dinas perkebunan Provinsi dan Pemda.* Pupuk ini diproduksi secara khusus dari hasil analisis Puslitkoka dengan mengambil *sample* jenis tanah dan dari daun-daunan sehingga sesuai dengan kondisi tanah daerah terkait. Sayangnya pupuk ini belum memiliki ijin sehingga tidak diperjualbelikan secara umum. Distribusi pupuk majemuk ini kepada petani dikoordinasi oleh Pemda melalui Distanbun yang dikoordinir oleh

**Tabel 9. Form Monitoring Keragaman Tanaman Gernas Kakao Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Tahun Pelaksanaan	Luas Tanam (Ha)	Produktivitas 2010 rata-rata (kg)	Produktivitas 2011 rata-rata (kg)	Produktivitas 2012 rata-rata (kg)
1	Talibura	2009	175,25	741	505	93
2	Hewokloang	2009	50,00	437	253	-
3	Nita	2009	382,00	869	569	-
4	Lela	2009	200,00	755	512	-
5	Mego	2009	92,75	654,00	462	-
6	Paga	2009	100,00	990,00	735	-
<b>TOTAL/RATA-RATA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>741,00</b>	<b>506,00</b>	<b>93,00</b>

Sumber: Distanbun, Sikka 2010.

Keterangan:

1. Serangan hama penyakit.
2. Tidak adanya perawatan lanjutan.
3. Tidak semua kebun ikut dalam kegiatan.

Gapoktan. Jumlah pupuk yang diberikan kepada petani kurang seimbang dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kakao sehingga hasilnya kurang optimal. Dalam hal ini kedepannya perlu diupayakan kelembagaan petani yang kuat untuk dapat mengkoordinir petani lainnya dalam memperoleh bantuan pupuk maupun bantuan lainnya dari pemerintah maupun dari stakeholder lain. Selain itu, perlunya kerjasama dan keterlibatan stakeholder lain baik dari Pemda maupun unsur non pemda (LSM, pelaku usaha, perbankan) untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada petani kakao untuk mengupayakan pupuk organik yang dapat dibuat sendiri oleh petani dalam kelembagaan kelompok tani.

*Ketersediaan pupuk majemuk formula khusus hanya sebatas pada program Gernas.* Dengan berakhirnya program Gernas, berpotensi tidak adanya keberlangsungan program bantuan pupuk yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemda setempat maupun kesadaran dari petani untuk secara mandiri mengusahakannya sendiri. Dengan keterbatasan pupuk tersebut, melalui fasilitasi Pemda (Distanbun terkait) perlu diupayakan pelatihan secara terpadu kepada petani untuk membuat pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran ternak hewan yang dipelihara sehingga petani melalui gapoktannya mampu mengusahakan sendiri kebutuhan pupuknya.

*Kegiatan intensifikasi ini relatif berhasil, namun karena luas cakupannya yang kecil menyebabkan dampak positifnya tidak terlihat secara signifikan.* Kendala dalam kegiatan intensifikasi ini lebih disebabkan karena minimnya paket bantuan yang diberikan, masih adanya serangan hama penyakit, dan faktor internal dari petani sendiri yang tidak melakukan pemeliharaan kebun secara berkelanjutan sehingga dampak yang ditimbulkan dari program Gernas ini tidak terlihat secara signifikan. Bantuan kegiatan intensifikasi hanya terbatas pada kebun yang memiliki kriteria persyaratan yang telah ditetapkan di Pedum teknis Ditjenbun, bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulus sehingga harapannya petani dengan bantuan stakeholder

lainnya mampu melanjutkan kegiatan intensifikasi maupun kegiatan pengembangan kakao lainnya secara mandiri.

#### 4. Program Pemberdayaan Petani Kakao

Selain 3 (Tiga) kegiatan utama diatas, guna meningkatkan kapasitas petani baik dalam budi daya maupun pengolahan pasca panen, maka program Gernas ini juga mengupayakan program pemberdayaan petani baik melalui penguatan kapasitas petani maupun penguatan kelembagaan petani kakao. Berikut upaya pemberdayaan petani yang dilakukan dalam kerangka program Gernas.

a) **Pemberdayaan budi daya kakao dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada petani.** Pelatihan budidaya tanaman dilakukan melalui sekolah lapang (SL), dimana petani dilatih oleh seorang tenaga pendamping yang akan mengajarkan petani bagaimana melakukan budidaya tanaman kakao dengan baik, termasuk pemupukan dan sanitasi lahan (25% teori dan 75% praktik lapangan). Kegiatan ini penting dilakukan guna membekali petani tentang tata cara berkebun sehingga diharapkan dengan pendampingan dan pelatihan langsung di lapangan membuat petani lebih memahami bagaimana cara merawat kebun sehingga hasil yang didapatkan optimal. Sayangnya keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping yang hanya 2 (Dua) orang untuk menangani 7 (Tujuh) Kecamatan menjadi kendala tersendiri di lapangan sehingga output yang dihasilkan tidak maksimal (umumnya 1 PPL mendampingi 1 desa dg 15 poktan). Dengan minimnya jumlah pendamping tersebut, Di Sikka, upaya pemberdayaan petani lebih banyak dilakukan oleh LSM melalui sekolah lapang.

Diakui oleh petani di Sikka, bahwa sekolah lapang yang dibentuk oleh LSM ini lebih bermanfaat karena petani diberikan pelatihan secara intensif dengan praktik langsung di kebun. Pendamping sekolah lapang disebut master training dan petani kunci yang bertugas untuk mendampingi dan melakukan

pelatihan kepada petani. Kemampuan teknis yang memadai ditambah pola pendekatan yang tepat kepada petani membuat petani lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam sekolah lapang yang diupayakan oleh LSM. \

**b) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung berupa pembentukan unit pengolahan hasil (UPH),** kotak fermentasi, dan sarana pendukung lainnya seperti motor yang digunakan untuk tenaga pendamping untuk menuju lokasi pendampingan. Pelatihan pengolahan pasca panen dilakukan melalui pembentukan unit pengolahan hasil (UPH) sebagai sarana pendukung guna memasarkan hasil kakao petani dan pengolahan hasil kakao melalui penyediaan kotak fermentasi sehingga mutu biji kakao yang dijual lebih berkualitas. Pada awal pembentukannya, UPH mendapat modal dari Pemda sebesar 94 juta untuk membeli kakao mentah dari petani. Keberadaan UPH sangat penting disamping sebagai penampung hasil petani, UPH juga diupayakan untuk melakukan pemberdayaan kepada petani terkait kualitas standar jual dan memotivasi petani untuk melakukan proses fermentasi sendiri sehingga petani tidak merugi.

Saat ini di Sikka, baru ada 3 UPH yang aktif, jumlah ini jelas sangat minim mengingat perannya yang besar khususnya dalam memutus mata rantai penjualan kakao sehingga petani mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan harga yang didapat dari pengumpul Desa maupun Kabupaten. Dengan jumlah yang minim tersebut menjadi salah satu sebab petani tetap memilih menjual kakaonya kepada pedagang pengumpul yang datang ke rumah-rumah petani langsung. Disamping letak UPH yang jauh dari tempat tinggal petani, rendahnya motivasi petani untuk melakukan fermentasi juga menyumbang belum optimalnya fungsi UPH. Petani umumnya malas melakukan fermentasi dikarenakan disparitas harga antara kakao fermentasi maupun non fermentasi tidak terlalu jauh. Disamping itu, karena kebutuhan yang mendesak

mendorong petani untuk menjual langsung kakaonya pada pedagang pengumpul meskipun harga yang didapat lebih rendah. Dalam hal ini, belum ada insentif maupun regulasi dari Pemda maupun Pemerintah yang mampu memotivasi petani untuk melakukan fermentasi dan menjual kakao fermentasi. Saat ini di Indonesia hanya sekitar 10-15% kakao Indonesia yang terfermentasi. Hal tersebut yang menyebabkan harga kakao Indonesia masih rendah dibandingkan Pantai Gading dan Ghana.

*Adanya UPH belum optimal dalam memutus rantai tata niaga kakao.* Kondisi tata niaga yang selama ini berjalan lebih didominasi oleh peran *middle man*. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Perkebunan Kementan, Heri Moerdianto yang menyatakan bahwa tata niaga kakao lebih didominasi oleh *middle man* yang mendapat keuntungan lebih besar sedangkan petani tetap mendapatkan harga yang rendah. Pemda maupun Pemerintah belum mampu melakukan intervensi apapun untuk meningkatkan posisi tawar petani kakao. Menilik pada pengelolaan kakao di Ghana maupun pantai gading yang dapat memproteksi petani dengan memberikan harga yang baik, sebenarnya dalam komdoiti lain kebijakan tersebut telah dilakukan, contohnya dalam komoditi bawang merah, pemda membeli bawang milik petani, sehingga pemda dapat melindungi petani dengan memberikan harga lebih baik. Seharusnya ada komitmen yang besar dari Pemda untuk dapat menerapkan kebijakan yang sama pada perdagangan kakao, sehingga tidak hanya petani yang mendapatkan keuntungan, namun secara jangka panjang kebijakan tersebut dapat menciptakan rasa aman bagi petani dan memotivasi petani untuk tetap berkebun.

*Program pemberdayaan petani ini lebih penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dibandingkan program fisik.* Kegiatan fisik seperti membagi-bagikan bibit, pupuk dan peralatan pertanian memang masih dibutuhkan, namun untuk jangka panjang keberlanjutannya tidak terjamin. Sebaliknya kegiatan pemberdayaan petani akan lebih terjamin keberlanjutannya. Dengan adanya peningkatan kapasitas petani manfaat yang dihasilkan akan berdampak dalam jangka panjang sehingga baiknya

pemerintah lebih fokus dalam hal peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani baik dalam hal budi daya tanaman kakao maupun peningkatan kapasitas pengolahan pasca panen.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pelaksanaan program Gernas memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan produktivitas maupun peningkatan mutu kakao petani. **Bagi petani**, program ini memberikan bantuan secara fisik maupun bantuan melalui upaya pemberdayaan petani dalam hal budi daya dan pengolahan pasca panen. Dari kegiatan tersebut, petani sedikit demi sedikit diberikan pemahaman pentingnya memelihara kebun kakao. **Bagi pengusaha**, program Gernas relatif mampu memberikan jaminan tersedianya pasokan *raw material* (biji kakao) bagi kelangsungan industri pengolahan kakao di Indonesia sehingga dapat mengurangi volume impor. Guna mengupayakan pengembangan kakao secara berkelanjutan, maka diperlukan beberapa upaya sebagai langkah perbaikan selanjutnya.

*Penguatan komitmen Pemda dan peran Dinas terkait (Distanbun) dalam upaya peningkatan produktivitas dan mutu kakao.* Dengan berakhirnya program Gernas, diperlukan penguatan komitmen pemerintah Kabupaten Sikka untuk melanjutkan program pengembangan kakao yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Sikka. Pemda Kab. Sikka harus lebih memberikan perhatian secara intensif dan mengupayakan keberlanjutan program pengembangan kakao yang sudah diinisiasi melalui program Gernas. Dinas terkait dalam hal ini Distanbun hendaknya menyusun program-program pengembangan kakao secara terpadu yang dituangkan dalam sebuah regulasi. Dengan adanya regulasi yang bersifat mengikat, maka diharapkan akan dapat menguatkan komitmen pemda dalam mengembangkan sektor kakao dan dapat melaksanakan program pengembangan kakao secara terpadu dan terintegrasi antar stakeholder terkait.

*Penguatan Forum Stakeholder sebagai upaya sinkronisasi dan koordinasi program pengembangan kakao.* Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya

bahwa salah satu kendala pelaksanaan Gernas adalah disinkronisasi antara Distanbun dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) sebagai lembaga teknis yang melakukan penyuluhan kepada petani. Adanya disinkronisasi tersebut disebabkan tidak adanya sinergitas program antar SKPD terkait. Upaya pemberdayaan petani berjalan sendiri-sendiri sehingga hasilnya tidak optimal. Praktik baik yang telah dilakukan di Kab. Sikka adalah dibentuknya forum stakeholder "**Dewan Kerjasama Ekonomi Daerah**" yang telah disahkan melalui Keputusan Bupati No. 245/HK/2012 Tentang Pembentukan Dewan Kerjasama Ekonomi Daerah. Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan terbangunnya kemitraan yang baik antar semua stakeholder terkait baik dari unsur pemda maupun non pemda. Disamping itu, melalui lembaga ini diharapkan dapat meminimalisir ego dari masing-masing lembaga/institusi sehingga dapat berperan secara optimal dalam menyusun suatu program bersama termasuk di dalamnya adalah penguatan peran lembaga keuangan dalam memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses permodalan dan mendapatkan kredit murah/mudah tanpa agunan.

*Penguatan kelembagaan petani melalui Gapoktan dalam mengupayakan penyediaan pupuk majemuk formula khusus.* Dalam program Gernas, pupuk yang digunakan tidak dijual secara bebas, namun petani masih bisa mengusahakannya kepada pabrik pupuk namun harus dalam jumlah besar. Oleh karena itu diperlukan suatu kelembagaan tani yang kuat melalui Gapoktan, maupun koperasi. Gapoktan baik berjalan sendiri, bermitra dengan koperasi ataupun dikoordinir oleh Distanbun dapat mengusahakan penyediaan pupuk untuk anggota kelompoknya, sehingga upaya perawatan dan pemupukan tanaman kakao dapat dilaksanakan secara optimal.

*Peningkatan kapasitas petani baik dalam hal pembudidayaan maupun peningkatan mutu hasil tanaman kakao.* Guna melanjutkan semangat upaya program pemberdayaan petani yang dicanangkan program Gernas kakao, hendaknya Pemda meningkatkan kemitraan yang telah dibangun dengan LSM maupun pihak swasta dalam melakukan upaya pemberdayaan kepada petani. Peran pihak swasta menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada petani kualitas kakao seperti apa yang

menjadi permintaan pasar dan memiliki harga yang baik. Dengan begitu petani menjadi termotivasi untuk memperbaiki kualitas mutu kakaonya dengan pertimbangan keuntungan yang akan didapat.

Sedangkan bagi pihak swasta, kemitraan tersebut dapat memberikan keuntungan tersendiri, karena dengan begitu pengusaha akan mendapatkan mutu kakao sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan.





FORDFOUNDATION

*Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah  
Regional Autonomy Watch*

Gd. Permata Kuningan Lt.10  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C  
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980  
Phone: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643